



# **RENCANA AKSI NASIONAL KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2020-2022**

---

## I. Pendahuluan

Rencana Aksi Nasional (RAN) merupakan sebuah dokumen yang menjadi inti pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah oleh Open Government Indonesia (OGI). RAN berisikan komitmen-komitmen hasil dari ko-kreasi antara K/L bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Setiap komitmen berisikan ukuran keberhasilan yang rinci untuk memastikan terlaksananya komitmen tersebut. Setiap komitmen juga mencerminkan nilai-nilai OGI yakni **Transparansi, Partisipasi, Inovasi, Akuntabilitas, dan Inklusif**.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Pemerintah/Open Government Indonesia (OGI) periode 2020-2022 merupakan rencana aksi keenam dalam sepuluh tahun perjalanan OGI. Implementasi RAN OGI mendukung misi Presiden ke-8 yakni “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” dan merupakan bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 khususnya **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Selain itu, implementasi RAN OGI keenam merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian agenda global yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semua komitmen yang disepakati dalam rencana aksi OGI memiliki keselarasan dengan tujuan SDGs.

RAN OGI periode 2020-2022 disusun pada saat Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tema besar rencana aksi periode ini adalah **Pemulihan Pasca-Pandemi COVID-19** yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19. Tema besar ini bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.” Dalam tema besar ini, ada beberapa isu strategis yang didorong yakni penguatan pelayanan publik, antikorupsi, transparansi fiskal, akses terhadap keadilan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik berspektif gender.

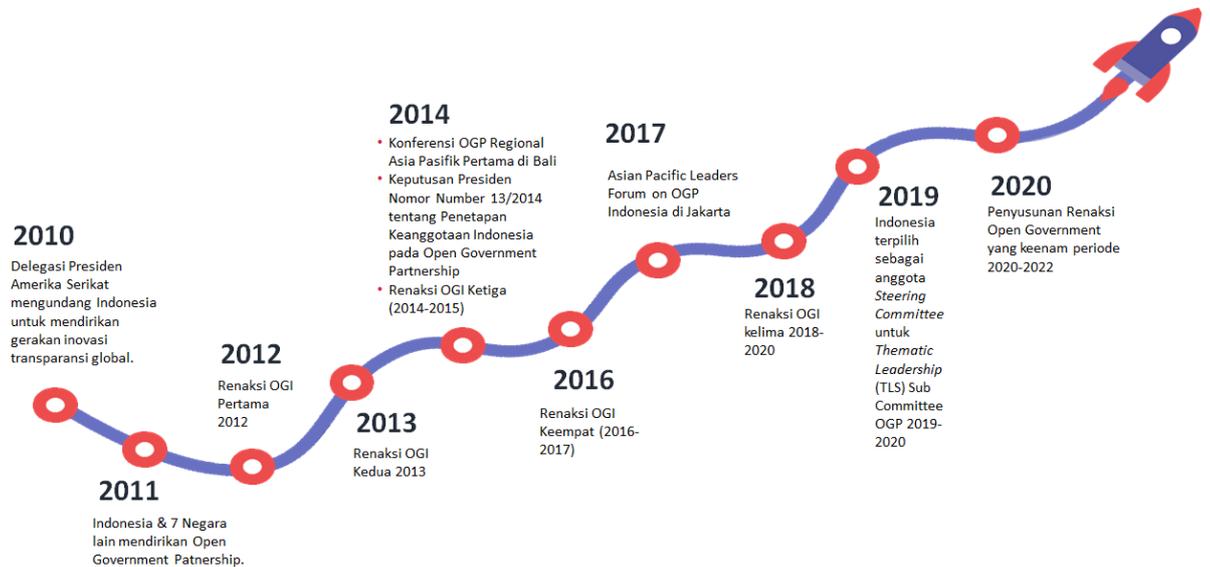
## II. Open Government Indonesia

### A. Perjalanan Open Government Indonesia

Secara umum, perjalanan OGI dimulai pada tahun 2010, ketika delegasi Pemerintah Amerika Serikat mengundang Pemerintah Indonesia bersama tujuh negara lainnya untuk bertemu dan mendirikan gerakan inovasi dan transparansi global. Selanjutnya, pada tahun 2011 Indonesia bersama tujuh negara lain mendirikan Open Government Partnership (OGP). Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia meluncurkan rencana aksi keterbukaan pemerintah yang pertama.

Hingga tahun 2020, Pemerintah telah menyusun enam rencana aksi keterbukaan pemerintah.

**Gambar 1. Perjalanan Open Government Indonesia**



**B. Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2020-2022**

**1. Perumusan, Kolaborasi dan Konsultasi Publik**

Perumusan RAN OGI diselenggarakan bersama-sama melalui mekanisme ko-kreasi antara Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Melalui mekanisme tersebut, di tahap awal, publik yang diwakili oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan praktik Keterbukaan Pemerintah.

**Gambar 2. Timeline Penyusunan RAN OGI 2020-2022**



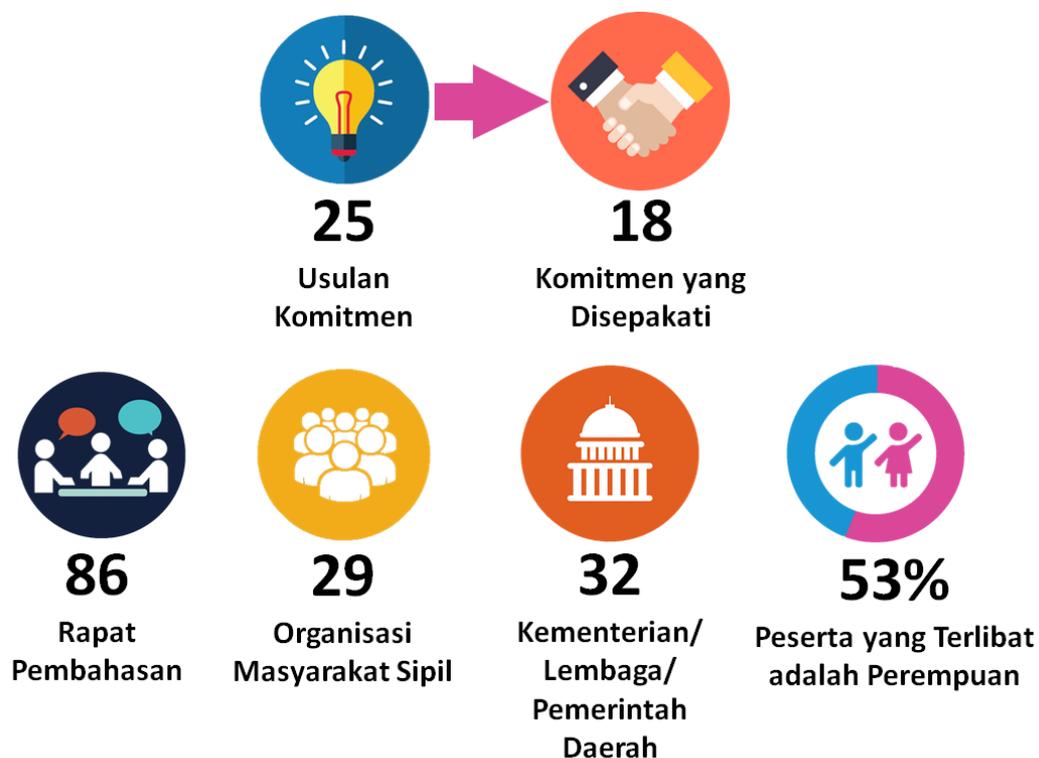
Secara garis besar, perumusan RAN OGI periode 2020-2022 dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan usulan awal RAN OGI yang berasal dari OMS. Tahapan pertama yang berlangsung selama 6 bulan dari bulan Januari hingga Juni 2020 telah menjangkau sebanyak 25 usulan. Dalam

periode tersebut, Sekretariat Nasional OGI dan OMS pengusul mengadakan pertemuan bilateral untuk memperdalam usulan RAN OGI.

Tahapan kedua adalah pembahasan usulan awal RAN OGI dengan direktorat terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Tahapan ini mempunyai tujuan untuk mensinergikan RAN OGI dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tahapan ini berlangsung selama 4 bulan yakni di bulan Juni hingga September 2020. Tahapan selanjutnya berlangsung di bulan Agustus hingga November yakni pembahasan usulan RAN OGI bersama dengan Kementerian/Lembaga dan OMS yang terkait.

Tahapan keempat adalah workshop finalisasi usulan RAN OGI dengan Kementerian/Lembaga terkait. Tahapan ini terdiri dari kegiatan berseri yang dilaksanakan pada tanggal 11, 14, dan 15 Desember 2020. Pada tanggal 11 Desember Sekretariat Nasional OGI mengadakan multistakeholder forum yang mengundang seluruh Kementerian/Lembaga dan OMS yang terlibat dalam penyusunan RAN OGI. Sedangkan tanggal 14 dan 15 Desember, merupakan workshop finalisasi usulan RAN OGI dengan mengundang Kementerian/Lembaga, direktorat terkait di Kementerian PPN/Bappenas, dan OMS. Hasil dari workshop finalisasi ini adalah kesepakatan bersama antara Kementerian/Lembaga dan OMS untuk melaksanakan target capaian RAN OGI 2020-2022. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi komitmen yang tercantum dalam RAN OGI ini.

**Gambar 3. Penyusunan RAN OGI Tahun 2020 Dalam Angka**



## 2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan RAN OGI di periode 2020-2022 memiliki skema yang sedikit berbeda dengan mekanisme di periode-periode sebelumnya. Pada skema sebelumnya, hanya Kementerian/Lembaga yang melaporkan kegiatan ko-kreasi per triwulan ke dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden (SISMONEV KSP). Namun, capaian kegiatan tidak dapat diakses oleh publik sehingga unsur keterbukaan dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Oleh karena itu, pada periode 2020-2022, ringkasan capaian kegiatan di SISMONEV KSP akan disajikan pula di website OGI ([ogi.bappenas.go.id](http://ogi.bappenas.go.id)) yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Periode pelaporan kegiatan dan capaian masing-masing instansi yang semula dilakukan setiap triwulan diubah menjadi per semester. Dengan kata lain, ada empat kali pelaporan yang dilakukan selama dua tahun. Hal ini bertujuan agar Kementerian/Lembaga lebih fokus dalam implementasi RAN dan dapat menghasilkan keluaran yang lebih berdaya ungkit.

Selain itu, OMS juga akan melaporkan kegiatan ko-kreasi yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga ke dalam sistem monitoring dan evaluasi yang ada di website Open Government Indonesia. Dengan adanya laporan baik dari Kementerian/Lembaga dan OMS, diharapkan publik dapat melihat secara detail skema ko-kreasi yang telah dijalankan selama pelaksanaan RAN OGI 2020-2022. Dengan begitu, proses pelibatan masyarakat sipil dalam kegiatan pemerintah dapat terlihat dengan jelas.

### III. Daftar Komitmen Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia

#### 1. Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
Indonesia Corruption Watch	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Informasi Pusat (KIP)</li> <li>2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan badan publik untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.</p> <p>Namun, setelah hampir sepuluh tahun UU KIP diterapkan, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi publik, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP). Masih banyak badan publik yang menganggap informasi PBJ, khususnya dokumen kontrak, dikecualikan atau tidak dapat diakses publik.</p> <p>Masyarakat pun kesulitan memantau proyek pemerintah karena akses terhadap informasi PBJP tidak diberikan. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek PBJP menjadi salah satu faktor penyebab sektor ini juga menjadi rawan korupsi. Sepanjang tahun 2019, ada 64% persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Dalam kondisi pandemi COVID-19, keterbukaan informasi PBJP terkait penanganan pandemi juga terbatas. Meskipun pandemi mengharuskan adanya pengadaan mendesak di tengah keadaan darurat</p>

	<p>tetap perlu mengindahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memerlukan pengawasan demi mencegah penyalahgunaan dan korupsi.</p> <p>Gagasan keterbukaan kontrak PBJP ini merupakan kelanjutan dari RAN OGI periode 2018-2020, khususnya dalam hal peningkatan transparansi proses PBJP yang menargetkan publikasi seluruh dokumen dalam bentuk data terbuka.</p> <p>Namun, hingga pertengahan 2020, Renaksi yang telah ditetapkan belum tercapai seluruhnya. Hingga Renaksi ini dibuat, Komisi Informasi Pusat belum merampungkan draft peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur tentang keterbukaan informasi di sektor pengadaan barang dan jasa.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Mendorong Keterbukaan Informasi terkait Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Adanya aturan yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum dan menghilangkan multitafsir tentang keterbukaan informasi dalam proses PBJP.</p> <p>Selain itu, monitoring masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik secara umum maupun dalam keadaan darurat, akan lebih efektif jika ada ketersediaan informasi pengadaan yang lebih lengkap, seperti spesifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, dan uraian pekerjaan, dalam bentuk format open data. Keterbukaan dokumen kontrak memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang tersedia dan menggunakannya untuk memberi masukan kepada pemerintah dan memantau pelaksanaan proyek-proyek di lapangan. Hal itu dapat menghasilkan pengadaan barang dan jasa berkualitas serta mendorong efisiensi anggaran.</p> <p>Lebih lanjut, Pemerintah dan OMS juga dapat memanfaatkan data tersebut untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan potensi kecurangan dalam pengadaan.</p>

Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan akuntabel. Adanya informasi terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya transparansi kegiatan pemerintah.	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	<p>Komitmen ini mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yakni Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik khususnya Program Prioritas “Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah” yakni Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan. Kegiatan Prioritas Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis, khususnya Program Prioritas “Penerapan SPSE Terintegrasi” yakni Pengembangan SPSE Terpusat.</p> <p>Komitmen ini juga sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16 yakni "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada Target 16.6: “Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat”, dan Target 16.10: “Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”.</p>	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Diterbitkannya revisi PERKI SLIP (Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik.) yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa	Januari 2021	Desember 2022

2. Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa	Januari 2021	Desember 2022
3. Terbukanya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		Maharani Putri S. W.
Jabatan, Departemen		Point of Contact - Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
E-mail dan nomor telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Komisi Informasi Provinsi</li> <li>3. Kementerian PPN/Bappenas</li> </ol>
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi Internasional Indonesia (TII)</li> <li>2. Seknas Fitra</li> <li>3. Indonesia Budget Center</li> <li>4. Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)</li> </ol>

## 2. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

Organisasi Masyarakat Sipil	
PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional)	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Semenjak diluncurkan pada tahun 2012, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) telah menjadi kanal rujukan utama publik dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan terhadap praktik pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan instansi penyelenggara pelayanan publik lainnya. Hingga tahun 2020, pengaduan yang masuk ke LAPOR! kurang lebih telah mencapai 1.705.245 pengaduan. Seiring dengan ditetapkannya LAPOR! sebagai Sistem Manajemen Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, saat ini juga telah banyak pengelola pengaduan di tingkat instansi yang telah terhubung dengan LAPOR!. Berdasarkan data pada laman lapor.go.id hingga tahun 2020, jumlah instansi yang terhubung dengan LAPOR! sebanyak 653 instansi, terdiri dari 34 Kementerian, 100 Lembaga, 34 Provinsi, 391 Kabupaten, dan 94 Kota.</p> <p>Namun demikian, dari seluruh instansi yang sudah terhubung dengan LAPOR!, baru sekitar 122 instansi (19%) yang telah dapat dikatakan baik. Penilaian ini didasarkan pada indikator tingkat penindaklanjutan pengaduan paling sedikit 50% dari keseluruhan jumlah pengaduan yang masuk. Jumlah tersebut belum memperhatikan tingkat kecepatan respon terhadap pengaduan. Jika dinilai lagi dengan indikator tingkat kecepatan respons, jumlah instansi pengelola</p>

	<p>pengaduan yang masuk ke dalam kategori baik akan semakin sedikit.</p> <p>Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat antusiasme publik terhadap LAPOR! terus meningkat, hal ini belum diimbangi dengan perbaikan kinerja instansi pengaduan. Jika hal ini tidak diperbaiki, maka tidak tertutup kemungkinan akan menghilangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAPOR! dan menurunkan tingkat motivasi publik untuk melakukan pengaduan.</p> <p>Padahal pengaduan masyarakat sangat penting, bukan saja sebagai dasar bagi perbaikan pelayanan publik, tetapi juga sebagai referensi bagi instansi dalam pengambilan keputusan, penyusunan program, dan penguatan kebijakan.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Meningkatkan responsivitas instansi pengaduan pelayanan publik yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan nilai persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara cepat.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun instansi lainnya ada kalanya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Proses pelayanan yang kurang lancar, buruknya barang dan/atau jasa publik yang disediakan, pengenaan tarif layanan yang tidak wajar, hingga perlakuan pegawai yang kurang simpatik adalah beberapa kasus yang sering dihadapi oleh publik sebagai penerima layanan, yang tentu saja menimbulkan kerugian, baik material maupun non-material. Untuk menyampaikan keluhan-keluhan ini, publik membutuhkan kanal pengaduan yang dapat merespon dengan cepat terhadap permasalahan yang mereka hadapi.</p> <p>Komitmen yang diusulkan untuk mendorong peningkatan responsivitas pengelola pengaduan SP4N-LAPOR! diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tingginya tingkat responsivitas pengelola pengaduan dengan demikian juga dapat memperkecil kerugian masyarakat akibat penyelenggaraan pelayanan publik yang kurang baik. Tingkat</p>

	<p>responsivitas yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola pengaduan dan instansi penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Pada derajat yang lebih tinggi, pelayanan pengaduan yang cepat juga akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yakni transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya respon yang cepat, maka tingkat kepercayaan publik terhadap LAPOR! akan semakin meningkat. Meningkatnya kepercayaan publik ini kemudian akan semakin mendorong peningkatan jumlah pengaduan di kanal LAPOR!. Dengan demikian keberlanjutan LAPOR! sebagai kanal untuk meningkatkan transparansi setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik akan terus terjaga. Hal ini akan mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin transparan dan akuntabel.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Komitmen ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh terutama target 16.7 yaitu menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan dan target 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p> <p>Komitmen ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Transformasi Pelayanan Publik. Program ini akan diterapkan melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.</p>
<p>Informasi tambahan.</p>	<p>KemenPAN-RB juga telah menyusun roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020–2024 yang akan segera ditetapkan dalam bentuk PermenPAN-RB. Berdasarkan roadmap tersebut, pada tahun 2020 target jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 227.995 pengaduan, dengan tingkat penyelesaian sebesar 60%; pada tahun 2021</p>

	<p>target pengaduan sebanyak 454.790 dengan tingkat penyelesaian sebesar 70%; dan pada tahun 2022 target pengaduan sebanyak 909.580 dengan tingkat penyelesaian sebesar 80%. Berdasarkan roadmap tersebut juga ditargetkan penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Pengelolaan Pengaduan akan dilakukan pada tahun 2021. Secara keseluruhan, strategi pencapaian dalam roadmap ini akan dilakukan dengan memperkuat empat aspek, yaitu: 1) Penguatan Kelembagaan; 2) Optimalisasi Teknologi Informasi; 3) Peningkatan Kapasitas SDM; 4) Penguatan Komunikasi dan Partisipasi Publik; dan 5) Penguatan Simpul (Hub) Koordinasi SP4N-LAPOR!.</p>	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti (target tingkat penyelesaian minimal 45% dari jumlah pengaduan pada tahun 2022)	Januari 2021	Desember 2022
2. Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022)	Januari 2021	Desember 2022
3. Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik	Januari 2021	Desember 2022

Informasi Kontak		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		Maharani Putri S. W.
Jabatan, Departemen		Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
E-mail dan nomor telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kantor Staf Presiden 2. Ombudsman RI 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	

### 3. Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Satu Data Indonesia di Tingkat Pemerintah Daerah

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia & Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink)	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Pada Juni 2019, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini menyaratkan adanya harmonisasi data-data yang diperoleh masing-masing kementerian dan lembaga, agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagikan. Kebijakan ini lahir sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka, yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga nasional.</p> <p>Dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia, masih terdapat tantangan baik dari sisi kelembagaan, ego-sektoral, masalah birokrasi dan relasi atau koordinasi, maupun hubungan pusat-daerah serta pada tataran teknis terkait produksi, format maupun perlindungan data dan lain sebagainya. Namun, masalah tersebut harus dapat diselesaikan secara bijak, karena berbagai kebijakan, program pembangunan, dan segala jenis layanan publik bagi masyarakat, membutuhkan data yang kuat dan akurat. Sehingga, kebijakan dan program pembangunan akan tepat sasaran, efektif dan efisien, serta memenuhi target dan kualitas dari tujuan utama pembangunan.</p> <p>Pengembangan Satu Data Indonesia harus mampu menunjukkan pencapaian dari berbagai program pembangunan dan digunakan bukan hanya bagi</p>

	pengambil kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga hingga unit pemerintahan terkecil di desa.
Apa bentuk komitmennya?	Mengawal implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan mendorong koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Keterbukaan informasi dan ketersediaan data-data pembangunan yang absah, lengkap dan akurat serta terintegrasi sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen penting dalam mencapai pemerintahan yang terbuka dan informatif.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Program ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan akuntabilitas. Adanya integrasi data yang mutakhir dan terbuka akan memudahkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih baik.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	<p>Komitmen ini akan mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan transformasi digital, pemanfaatan teknologi global yang bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa untuk pemerintah akan mendorong pelaksanaan Satu Data Indonesia dalam rangka pemanfaatan data yang saling terhubung, terstandar, dan dapat dibagipakaikan, serta memanfaatkan analisa dari <i>big data</i> untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan.</p> <p>Selain itu, komitmen ini berkaitan dengan target SDGs No.16: "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada target 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan target 16.10 yaitu menjamin akses publik terhadap informasi</p>

	dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pusat Statistik</li> <li>2. Badan Informasi Geospasial</li> <li>3. Kementerian Keuangan</li> <li>4. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> </ol>
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

#### 4. Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
Yayasan TIFA	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Selama ini, ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan lebih banyak dibuka pada proses perencanaan yang dimulai dari tingkat desa hingga nasional, misalnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sayangnya, keterlibatan masyarakat seringkali hanya berhenti pada tahapan tersebut. Publik belum banyak dilibatkan dalam proses implementasi, monitoring, dan evaluasi program.</p> <p>Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah sudah semestinya terlibat langsung untuk menilai apakah program tersebut bermanfaat, perlu dilanjutkan, dikaji ulang, atau harus dihentikan dan digantikan dengan program yang lebih sesuai. Penilaian publik ini tidak hanya semata-mata untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan program pembangunan telah dijalankan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mengkaji dampak dari program-program tersebut serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik.</p> <p>Mekanisme <i>Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat</i> memungkinkan pelibatan masyarakat secara langsung dalam menilai dampak dan kemanfaatan sebuah program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan konsep pelibatan masyarakat dalam proses yang terbuka antara masyarakat dan</p>

	<p>pemerintah. Dalam Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat, terdapat diskusi terstruktur dengan pengampu kebijakan, masyarakat, dan tenaga ahli yang dapat menghasilkan penilaian dan rekomendasi terkait program yang sudah berjalan.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Memperkenalkan dan mendorong mekanisme evaluasi program pembangunan berbasis masyarakat di beberapa daerah <i>pilot project</i>.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Pelaksanaan <i>Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat</i> berfokus pada evaluasi kemanfaatan dan dampak program bagi masyarakat, bukan evaluasi teknokratis seperti penyerapan anggaran maupun ketertiban administrasi. Dengan adanya <i>Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat</i>, diharapkan program pembangunan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga sumber daya yang tersedia juga dapat dimanfaatkan lebih efisien untuk program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Komitmen ini sesuai dengan nilai Keterbukaan Pemerintah yakni akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dan pelibatan publik dalam evaluasi program pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, komitmen ini mendukung reformasi keterbukaan pemerintah karena memungkinkan publik untuk memiliki suara dalam menentukan apakah suatu program layak untuk terus dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan, atau dihentikan.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Program ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh terutama indikator 16.7 yaitu menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan dan 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Terkait dengan RPJMN 2020-2024, komitmen ini mendorong</p>

	penguatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik.	
Informasi tambahan.	<p>Metode <i>Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat</i> telah dilaksanakan di Kanada dan Jepang dengan sejumlah capaian positif. Dengan menerapkan program ini pada periode 90-an, Pemerintah Kanada berhasil mencapai keseimbangan bahkan surplus pada neraca pendapatan dan belanja negara serta naiknya Gross National Product (GNP). Di Jepang metode ini berkontribusi terhadap upaya reformasi birokrasi pegawai negeri, serta penghematan belanja pemerintah.</p> <p><i>Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat</i> bertujuan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan akuntabel melalui pelibatan aktif masyarakat, meningkatkan efisiensi anggaran dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan program pemerintah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dari program pembangunan.</p> <p>Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat ini akan dilaksanakan bekerjasama dengan <i>Japan Initiative</i> atas dukungan pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jepang.</p>	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Menguatnya Kapasitas Pemerintah Desa, BPD, pendamping desa, dan masyarakat untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan	Januari 2021	Desember 2022

inovasi di dua desa pilot project.		
2. Terlaksananya <i>pilot project</i> Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di dua desa.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		Maharani Putri S. W.
Jabatan, Departemen		Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
E-mail dan nomor telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	<i>Japan Initiative</i>

## 5. Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nadhlatul Ulama	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Lembaga Administrasi Negara
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Di tengah masyarakat Indonesia, masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan publik akibat adanya konflik vertikal (dengan pemerintah) maupun horizontal (dengan kelompok lain). Kelompok-kelompok masyarakat tersebut merupakan populasi tersembunyi yang tidak mendapatkan hak sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan kesejahteraan antara kelompok-kelompok yang tereksklusi tersebut dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebagai contoh, terdapat kelompok yang bermasalah dengan identitas keagamaan dan mendapatkan stigma negatif di masyarakat. Alhasil, mereka tidak diterima secara sosial dan politik. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai akses terhadap intervensi sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak terdata oleh pemerintah sebagai penerima bantuan sosial.</p> <p>Program ini menjadi lebih signifikan di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19. Hal ini dilandasi oleh fakta bahwa ketidaksetaraan sosial berkontribusi dalam penyebaran pandemi (Turchin, 2020). Di Amerika Serikat, korban terdampak COVID-19 paling besar adalah kelompok <i>African-American</i> yang memiliki batasan mobilitas sosial dibanding kelompok lainnya. Aksesibilitas mereka terhadap pelayanan kesehatan sangat rendah.</p>

Apa bentuk komitmennya?	Mendorong diseminasi konsep "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal" kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) – Pemerintah Daerah.	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	<p>Model pelayanan publik untuk kelompok marjinal menggunakan pendekatan inklusi sosial. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal. Misalnya, memberikan pengakuan atas identitas kelompok marjinal yang tereksklusi ini dalam data kependudukan akan membuka akses pelayanan publik bagi mereka. Hal ini menjadi penting terutama dalam masa pandemi agar penanganan pandemi di komunitas marjinal yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik dapat berjalan optimal.</p> <p>Dengan adanya diseminasi konsep "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal" kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diharapkan bahwa OPD dapat memberikan pelayanan publik yang sesuai pada kelompok marjinal.</p>	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Program ini sejalan dengan nilai Keterbukaan Pemerintah yakni inklusif. Inklusivitas dapat dicapai jika kelompok yang tereksklusi bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara selayaknya warga negara pada umumnya. Dengan kata lain, program ini menyasar pada pembuatan model pelayanan publik yang dapat merangkul atau menginklusi kelompok marjinal atau kelompok yang tereksklusi.	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Program ini sejalan dengan Program Prioritas RPJMN terkait Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Goal 1 dari SDGs untuk memberantas kemiskinan.	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir

Jumlah daerah yang mendapatkan diseminasi konsep "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal" kepada kalangan OPD	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

**6. Peraturan Pelaksana Untuk Asesmen Pemenuhan Kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Setiap Tahapan Acara Peradilan**

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi LBH APIK Indonesia</li> <li>2. Indonesian Judicial Research Society (IJRS)</li> <li>3. LBH Aceh</li> <li>4. LBH APIK Jakarta</li> <li>5. LBH Bandung</li> <li>6. LBH Jakarta</li> <li>7. LBH Papua</li> <li>8. LBH Masyarakat</li> <li>9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</li> <li>10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)</li> </ol>	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Mahkamah Agung</li> <li>3. Kejaksaan</li> <li>4. Kepolisian Republik Indonesia</li> </ol>
<b>Deskripsi Komitmen</b>	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Program ini didasarkan pada temuan Organisasi Bantuan Hukum bahwa seringkali kebutuhan psikososial dari penyandang disabilitas tidak mendapat asesmen yang layak. Namun, belum ada peraturan teknis yang menysasar permasalahan ini, sehingga dalam praktiknya aparaturn penegak hukum akan melakukan asesmen sesuai kapasitas mereka. Seringkali identifikasi kebutuhan tidak dapat dilakukan dan pemenuhan keadilan tersendat.</p> <p>Oleh karena itu perlu adanya peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan sesuai dengan PP no. 39 tahun 2020. Peraturan pelaksana ini dibentuk untuk mengakomodasi setiap tahapan acara peradilan, yakni dari segi Kepolisian yang</p>

	bertanggung jawab untuk membentuk peraturan pelaksana untuk penyidikan, Kejaksaan yang bertanggung jawab untuk penuntutan dan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab membentuk peraturan pelaksana untuk tahapan persidangan.	
Apa bentuk komitmennya?	Penyusunan dan publikasi peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Program ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum untuk menilai kebutuhan korban, dengan harapan bahwa kebutuhan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas dapat dinilai sehingga korban mendapatkan pemenuhan kebutuhan hukum sesuai dengan kebutuhannya.	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Program ini akan mendukung SDGs Goal 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Program ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni inklusif. Program ini dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok marjinal khususnya penyandang disabilitas dalam setiap tahapan peradilan.	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi	Januari 2021	Desember 2022

penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung.		
2. Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kejaksaan.	Januari 2021	Desember 2022
3. Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Kepolisian.	Januari 2021	Desember 2022
4. Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga masyarakat.	Januari 2021	Desember 2022

<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		Maharani Putri S. W.
Jabatan, Departemen		Point of Contact - Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
E-mail dan nomor telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 7. Penguatan Portal Informasi Bantuan Hukum

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi LBH APIK Indonesia</li> <li>2. Indonesian Judicial Research Society (IIRS)</li> <li>3. LBH Aceh</li> <li>4. LBH APIK Jakarta</li> <li>5. LBH Bandung</li> <li>6. LBH Jakarta</li> <li>7. LBH Papua</li> <li>8. LBH Masyarakat</li> <li>9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</li> <li>10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)</li> </ol>	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)</li> <li>2. Mahkamah Agung</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Dalam menguatkan pelaksanaan kebijakan bantuan hukum, Pemerintah Republik Indonesia perlu membangun atau menguatkan satu portal informasi yang bertujuan untuk menyediakan basis data dan memberikan akses informasi bagi masyarakat. Portal informasi tersebut akan menyimpan basis data terpusat yang diperbarui dengan data-data yang dibutuhkan masyarakat.</p> <p>Di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19, kebutuhan terkait adanya portal informasi menjadi lebih tinggi karena pemberian pelayanan tatap muka semakin dibatasi, sementara kebutuhan terkait adanya bantuan hukum selalu ada. Terkait dengan perlindungan data pribadi, basis data penanganan perkara yang bersifat pribadi akan tetap dijamin kerahasiaannya sehingga akses publik akan dibatasi untuk kategori data tersebut.</p>

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Pembangunan portal informasi bantuan hukum yang berisi data <i>real-time</i> serta dapat diakses dengan mudah oleh publik.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Portal informasi yang memberikan akses informasi memegang peran penting untuk pemenuhan akses bantuan hukum. Selain memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi, negara juga perlu memastikan agar warga yang mengakses informasi tersebut bisa dengan mudah memahami dan membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya. Artinya, informasi bantuan hukum tidak sekedar disosialisasikan tapi juga memuat arahan dan edukasi yang memudahkan penggunaannya. Hal ini mengingat banyaknya informasi yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat akan membuat publik justru luput atas hal-hal penting dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya.</p> <p>Terakhir, dengan adanya pembaruan basis data, maka pemetaan terhadap kebutuhan hukum dapat dilakukan. Nantinya, database ini akan membantu pengalokasian Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah serta jenis bantuan seperti litigasi atau non-litigasi.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi. Penguatan basis data bantuan hukum yang terintegrasi dalam portal informasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemberian bantuan hukum. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga akan tumbuh seiring dengan adanya <i>database</i> dan akses terhadap informasi yang akurat.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Komitmen ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan. Terutama target 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-</p>

	2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 8. Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi LBH APIK Indonesia</li> <li>2. Indonesian Judicial Research Society (IIRS)</li> <li>3. LBH Aceh</li> <li>4. LBH APIK Jakarta</li> <li>5. LBH Bandung</li> <li>6. LBH Jakarta</li> <li>7. LBH Papua</li> <li>8. LBH Masyarakat</li> <li>9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</li> <li>10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)</li> </ol>	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Program ini merupakan kelanjutan dari komitmen RAN periode 2018-2020 yakni Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum. Dalam periode sebelumnya, indikator yang dicapai meliputi tersedianya peraturan daerah dan peningkatan jumlah penerima bantuan hukum. Akan tetapi, kedua aspek tersebut dirasa masih belum menaungi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, program penguatan bantuan hukum ini akan berfokus pada dua aspek yakni penguatan dari segi OBH sebagai institusi dan sumber daya manusia yang menjadi kunci penyelenggaraan OBH.</p> <p>Saat ini, sebagian besar OBH terkonsentrasi di kota besar. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mendorong pendirian OBH di wilayah Kabupaten/Kota kecil atau terjauh dengan mempermudah proses verifikasi dan akreditasi serta pemberian dispensasi terhadap pendirian OBH di wilayah-wilayah dimaksud.</p>

	<p>Selanjutnya, dari segi penguatan sumber daya manusia, Kementerian Hukum dan HAM sedang Menyusun Revisi Rancangan Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Kurikulum paralegal. Melalui kebijakan tersebut diharapkan setiap organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi dapat mengadakan sekurangnya satu kali pelatihan paralegal kepada masyarakat dengan jumlah peserta paling sedikit 20 orang dengan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam dua tahun, setidaknya terdapat 10.000 orang masyarakat yang terlatih untuk menjadi pelaksana pemberi bantuan hukum dan membantu pemberian bantuan hukum di daerah terjauh.</p> <p>Penyelenggara bantuan hukum sedang menyusun kebijakan mengenai standar layanan bantuan hukum. Namun, masing-masing OBH tetap diberi kesempatan untuk meratifikasi dan mengembangkan sumber daya manusia di lembaganya dengan dukungan dan asistensi dari penyelenggara bantuan hukum. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan masing-masing OBH memiliki standar layanan bantuan hukum yang mengacu pada standar layanan bantuan hukum yang dikeluarkan oleh penyelenggara bantuan hukum.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Perluasan akses dan kapasitas layanan bantuan hukum.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Dengan adanya pendirian OBH di wilayah terjauh diharapkan bahwa kebutuhan bantuan hukum masyarakat di wilayah terjauh dapat diakomodasi. Selain itu, program ini akan memastikan jumlah OBH di wilayah terjauh sesuai dengan besarnya permintaan bantuan hukum dari masyarakat.</p> <p>Selanjutnya, dari segi sumber daya manusia, program ini akan meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum sebagai pihak pemberi bantuan hukum, khususnya paralegal. Selain itu, penguatan kapasitas SDM ini dapat dilakukan dengan implementasi kebijakan Standar Layanan Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum di OBH.</p>

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni partisipasi dan inklusi. Dengan adanya pelatihan bagi paralegal, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di wilayah terjauh.</p> <p>Selain itu, pendirian OBH di wilayah terjauh memiliki nilai inklusi karena selama ini wilayah terjauh selalu menjadi daerah yang memiliki sumber daya lebih rendah daripada kota-kota besar yang terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah terjauh akan terinklusi dengan mendapatkan akses terhadap keadilan dengan adanya OBH di wilayah mereka. .</p>	
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Komitmen ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan terutama target 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.</p>	
<p>Informasi tambahan.</p>	<p>-</p>	
<p>Indikator capaian dengan target terukur:</p>	<p>Tanggal Mulai</p>	<p>Tanggal Berakhir</p>
<p>1. Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH).</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>2. Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>
<p>3. Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>

Organisasi Bantuan Hukum.		
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 9. Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi LBH APIK Indonesia</li> <li>2. Indonesian Judicial Research Society (IJRS)</li> <li>3. LBH Aceh</li> <li>4. LBH APIK Jakarta</li> <li>5. LBH Bandung</li> <li>6. LBH Jakarta</li> <li>7. LBH Papua</li> <li>8. LBH Masyarakat</li> <li>9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</li> <li>10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)</li> </ol>	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengakui bahwa korban berhak atas bantuan hukum. Namun, pelaksanaan dari UU Bantuan Hukum saat ini hanya memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin yang dimaknai secara ekonomi. Pasal 5 ayat 1 UU tersebut dinyatakan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Sehingga, cakupan miskin dalam hal ini lebih luas dari hanya bersifat ekonomi, yakni terkait tidak terpenuhinya hak-hak dasar secara layak dan mandiri.</p> <p>Di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka. Selain pengertian miskin yang masih terbatas, implementasi UU Bantuan Hukum juga masih lebih memprioritaskan bantuan hukum litigasi untuk tersangka/terdakwa, demikian halnya dengan pengalokasian</p>

	<p>anggaran litigasi lebih besar dibandingkan nonlitigasi, sehingga dalam pelaksanaannya organisasi bantuan hukum yang melakukan pendampingan terhadap korban di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan, dan pendampingan korban di luar proses pengadilan sangat sulit untuk mengakses dana bantuan hukum, dikarenakan minimnya anggaran untuk pendampingan korban.</p> <p>Program ini menjadi sangat relevan di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19 karena tingkat kekerasan meningkat selama pemberlakuan kebijakan <i>work from home</i>. LBH Apik mencatat ada 90 aduan kekerasan dari tanggal 16 Maret hingga 7 Juni 2020. Kekerasan paling tinggi terjadi di dalam konteks rumah tangga, sementara kekerasan lain terjadi secara daring melalui ancaman.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Inklusi kelompok rentan dan gender dalam pemberian bantuan hukum bagi korban.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Korban kejahatan untuk kelompok rentan akan mendapatkan bantuan hukum, sihat dan layanan pendukung pengadilan di dalam keseluruhan proses hukum untuk menjamin akses menuju keadilan dan menghindari terjadinya viktimisasi sekunder. Hal ini mencakup layanan-layanan lainnya, seperti penerjemahan dokumen-dokumen hukum bilamana diperlukan atau diwajibkan.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Komitmen ini mendukung tercapainya Goal 5.2 SDGs yakni menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya dan Goal 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Program ini sejalan dengan nilai inklusif yang terdapat dalam Keterbukaan Pemerintah. Inklusivitas dapat dicapai jika kelompok rentan dapat diinklusi dengan mendapatkan akses terhadap keadilan. Selama ini, penyandang disabilitas dan perempuan seringkali tereksklusi karena keterbatasan penegak hukum dalam memahami kebutuhan mereka sebagai korban.</p>

Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	Januari 2021	Desember 2022
2. Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 10. Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi LBH APIK Indonesia</li> <li>2. Indonesian Judicial Research Society (IIRS)</li> <li>3. LBH Aceh</li> <li>4. LBH APIK Jakarta</li> <li>5. LBH Bandung</li> <li>6. LBH Jakarta</li> <li>7. LBH Papua</li> <li>8. LBH Masyarakat</li> <li>9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</li> <li>10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)</li> </ol>	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)</li> <li>2. Komisi Informasi Pusat</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?</p>	<p>Keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya publik secara partisipatif dan bertanggung jawab. Saat ini jaminan hukum terkait Keterbukaan Informasi telah tersedia yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP ini merupakan jaminan hukum yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Upaya pemerintah yang telah memberikan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi patut diapresiasi. Namun, jaminan hukum saja tidaklah cukup. Dibutuhkan prasyarat-prasyarat lain agar hukum dapat berlaku secara efektif mendukung keterbukaan informasi. Salah satunya adalah tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.</p>

	<p>Namun, banyak kasus yang dihadapi oleh masyarakat seringkali berkaitan dengan akses terkait informasi. Hal ini menyebabkan masyarakat harus melalui mekanisme permohonan informasi, keberatan, hingga proses sengketa informasi (tahapan mediasi, ajudikasi, hingga gugatan di pengadilan). Melihat proses tersebut, isu ini membutuhkan ketersediaan bantuan hukum untuk akses informasi.</p>	
Apa bentuk komitmennya?	Penguatan bantuan hukum terkait sengketa informasi	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Usulan ini akan mendorong adanya akses informasi publik yang dapat membantu proses ajudikasi. Dengan demikian akses atas informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Komitmen ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni inklusi. Dengan adanya akses terhadap informasi, maka proses sengketa yang dialami oleh masyarakat terutama kelompok adat akan lebih mudah untuk ditangani. Oleh karena itu, kebutuhan kelompok adat yang seringkali tereksklusi dapat diakomodasi.	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Komitmen ini akan mendukung mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh terutama target 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, komitmen ini sejalan dengan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Terlaksananya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam	Januari 2021	Desember 2022

penanganan perkara sengketa informasi		
2. Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap mediasi, adjudikasi non litigasi, serta tahap keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Mahkamah Agung 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 11. Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink)	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian Sosial
<b>Deskripsi Komitmen</b>	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam. Selama ini, penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima. Selain itu, data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program. Sebelumnya, pada RAN OGI 2018-2020 telah dijalankan komitmen terkait Akuntabilitas Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang ditanggung APBN dengan menggunakan sistem yang disiapkan oleh Kementerian Sosial yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).</p> <p>Semua program kesejahteraan harus mengacu kepada data terpadu yang saat ini bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS). Data ini, sudah bisa diakses oleh publik dengan mengakses melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki untuk mengecek apakah dirinya masuk dalam program tersebut atau tidak. Proses pendataan dilakukan mulai tingkat desa hingga masuk dalam sistem pusat. Namun demikian, keberhasilan sistem ini perlu diintegrasikan dengan data-data yang terbaru dengan program-program yang lainnya, tidak hanya sebatas pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja, namun perlu dikembangkan dan diintegrasikan untuk seluruh program kesejahteraan sosial seperti PKH, BPNT, KIP, KIS dan juga program-program kesejahteraan lainnya.</p>

Apa bentuk komitmennya?	Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi).
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Komitmen ini mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, program ini akan mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Revolusi Industri 4.0
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Komitmen ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Adanya data terpadu yang menjadi data yang akuntabel melalui mekanisme pendataan dan pemrosesan data yang terbuka, melibatkan partisipasi publik dengan pemanfaatan teknologi.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Komitmen ini berkaitan dengan target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No.16 yakni Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, terutama pada Target 16.6 yakni mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan Target 16.10 yaitu menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Selain itu, komitmen ini akan sejalan dengan Daftar Proyek Prioritas Strategis di RPJMN 2020-2024 nomor 18 yaitu <i>"Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh"</i>
Informasi tambahan.	Pemerintah Indonesia sudah memiliki modalitas yang cukup baik untuk integrasi dalam data kesejahteraan. Melalui Perpres 38/2019 tentang Satu Data Indonesia, yang seharusnya dapat menjadi momentum penting dalam berbagai program yang menggunakan data yang terintegrasi, update dan tidak ada kesimpangsiuran data.

Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS - NG	Januari 2021	Desember 2022
2. Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap <i>feedback</i> masyarakat.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		Maharani Putri S. W.
Jabatan, Departemen		Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
E-mail dan nomor telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 12. Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan di Desa

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
1. Wahana Visi Indonesia (WVI) 2. Seknas FITRA 3. Transparansi Internasional Indonesia (TII) 4. Kapal Perempuan 5. INFID 6. Media Link (Perkumpulan Media Lintas Komunitas) 7. Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi)	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Pendekatan akuntabilitas sosial yang diimplementasikan di beberapa daerah telah menghasilkan adanya peningkatan kualitas layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan publik. Misalnya, program yang telah dilaksanakan Wahana Visi Indonesia di NTT dan Kalimantan Barat telah meningkatkan pemahaman masyarakat dan kader posyandu terhadap standar pelayanan publik. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk menggunakan dana desa dalam penambahan fasilitas kesehatan dan konsultasi posyandu. Selain itu, tingkat kematian ibu dan anak juga menurun setelah masyarakat di NTT dan Kalimantan Barat menggunakan pendekatan akuntabilitas sosial.</p> <p>Oleh karena itu, pendekatan akuntabilitas sosial dapat diimplementasikan dalam program pembangunan di desa. Para Kader Pembangunan Aparat pemerintahan desa, BPD, dan masyarakat dapat dilatih untuk dapat mengimplementasikan pendekatan akuntabilitas sosial. Para kader tersebut diharapkan dapat</p>

	memfasilitasi implementasi akuntabilitas sosial sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan di desa.
Apa bentuk komitmennya?	Kerja sama berbagai pihak untuk memfasilitasi pendekatan akuntabilitas sosial di tingkat desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik di desa.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	<p>Aparat pemerintahan desa dan BPD bertugas untuk memastikan pelayanan di desa berkembang sesuai kebutuhan warga. Dalam hal ini, para kader merupakan aktor yang dapat memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pemerintah desa, agar tercipta pembangunan desa yang kolektif, inklusif dan demokratis.</p> <p>Dengan adanya pelatihan akuntabilitas sosial bagi aparat pemerintahan desa, BPD, pendamping masyarakat (kader), dan masyarakat, diharapkan semua pihak dapat mengembangkan kapasitas untuk berkontribusi dalam mengembangkan program pembangunan desa yang tepat sasaran.</p> <p>Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada karena pendekatan akuntabilitas sosial memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan <i>feedback</i> terhadap layanan yang ada.</p>
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Program ini selaras dengan nilai keterbukaan pemerintah yakni partisipasi dan inklusi. partisipasi dan inklusi masyarakat ditandai dengan adanya pelibatan para kader yang selama ini membantu kampanye kesehatan dalam mengajak para ibu untuk mengecek kesehatan ibu hamil dan balita.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Program ini akan mendukung Goal 3 dalam SDGs yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Selain itu, program ini juga selaras dengan Kegiatan Prioritas Nasional dalam RPJMN yakni Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.
Informasi tambahan.	-

Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan	Januari 2021	Desember 2022
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD untuk memahami konsep implementasi akuntabilitas sosial.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

### 13. Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mempunyai portal informasi berbasis <i>website</i> untuk hampir setiap tahapan pemilu. Akan tetapi, portal KPU saat ini merupakan portal informasi yang dihimpun dari berbagai sistem informasi. Sistem informasi Pemilihan Umum (Pemilu) tersebar di berbagai domain yang berbeda dan tidak tersentralisasi. Misalnya Sistem Informasi Pencalonan Pemilu (SILON), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Tahapan (SITAP), dan sebagainya. Oleh karena itu, ada beberapa masalah dihadapi publik dalam menggunakan layanan sistem informasi tersebut.</p> <p>Permasalahan yang pertama yaitu data dan informasi tidak tersedia setiap waktu dan tidak dalam format data terbuka. Kedua, data dan informasi Pemilu tersebar dan tidak terkoneksi satu sama lain. Misalnya, data perolehan suara tidak terhubung dengan profil lengkap calon terpilih. Selanjutnya, data dari pemilu ke pemilu tidak terhubung sehingga publik tidak bisa melihat fenomena secara historikal. Inovasi keterbukaan data dan informasi pemilu terjadi ketika Pemilu tahun 2014, dimana KPU mengumumkan secara daring daftar calon sementara dan rekapitulasi secara elektronik. Namun, setelah Pemilu 2014 belum tampak terobosan baru yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu.</p> <p>Selain itu, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan adanya banyak pembatasan dalam interaksi fisik di berbagai wilayah di Indonesia. Terobosan baru</p>

	diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu. Adanya portal informasi yang lengkap akan memudahkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengetahui semua informasi yang mereka perlukan tanpa adanya interaksi fisik yang signifikan.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini mendorong penyelenggara pemilu menyediakan data-data pemilu dalam format terbuka yang dapat diakses semua kelompok masyarakat.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	<p>Keterbukaan data pemilu bermanfaat bagi pemilih, kandidat, penyelenggara, dan pengawas dalam pemilu. Ketersediaan data terbuka berguna bagi berbagai kalangan untuk mengakses informasi terperinci yang sama dengan yang tersedia bagi pemangku kepentingan. Data terbuka memungkinkan semua kalangan mengikuti dan memahami proses dan hasil pemilu.</p> <p>Data terbuka juga memungkinkan pemilu berjalan lebih inklusif, transparan, dan terpercaya. Informasi yang transparan akan mencegah terjadinya konflik akibat ketidakpuasan atau penolakan terhadap hasil pemilu. Prinsip keterbukaan mampu menopang integritas dari proses dan hasil pemilu. Setiap proses pemilu dapat dinikmati dan dikawal secara kasat mata. Bahkan, publik dapat mencatat atau merekam kembali setiap data dan informasi yang terlihat, untuk disajikan kembali dengan tampilan yang lebih kreatif dan memikat.</p>
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Program penguatan ekosistem keterbukaan data dan informasi pemilu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang terbuka diharapkan mampu merangsang partisipasi masyarakat yang lebih bermakna seperti keaktifan untuk mencari informasi tentang kandidat dan turut mengawal jalannya penghitungan suara. Seiring dengan itu, diharapkan kepercayaan masyarakat juga kian tumbuh.

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Komitmen ini sejalan dengan Program Prioritas RPJMN yaitu Konsolidasi Demokrasi SDGs Goal ke-16 yakni menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.	
Informasi tambahan.	Keterbukaan data dan informasi pemilu menjadi faktor penting bagi negara yang berlandaskan prinsip demokrasi. Setiap tahapan pemilu dapat dikawal oleh publik melalui catatan dan rekaman data yang dapat diakses secara luas. Hal ini akan memperkuat legitimasi proses pemilu.	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data) dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh KPU	Januari 2021	Desember 2022
2. Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	

E-mail dan nomor telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Badan Pengawas Pemilu RI 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor swasta, multilateral, dan kelompok kerja	-

#### 14. Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data

<b>Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul</b>	
INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)	
<b>Januari 2021 - Desember 2022</b>	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian Kesehatan
<b>Deskripsi Komitmen</b>	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Di masa pandemi COVID-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat di Indonesia, fasilitas kesehatan menjadi tempat yang rawan penularan COVID-19. Selain itu, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang biasa diselenggarakan di tingkat RW, ditiadakan sementara di banyak daerah akibat pandemi. Sebagai gantinya, warga diarahkan untuk mendapatkan pelayanan posyandu di puskesmas, baik di tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan. Padahal, posyandu merupakan tempat yang mudah diakses oleh warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan ibu dan anak, termasuk konsultasi kesehatan reproduksi, pemeriksaan kehamilan, dan konsultasi alat kontrasepsi.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya <i>platform</i>/kanal khusus yang dapat digunakan oleh perempuan untuk dapat menemukan informasi tentang lokasi fasilitas kesehatan yang dapat didatangi. Layanan kesehatan yang dimaksud khususnya mencakup kesehatan seksual dan reproduksi, pemeriksaan kehamilan, informasi tempat untuk melahirkan yang aman, serta akses untuk alat kontrasepsi.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Pengembangan <i>Platform</i> Sistem Pelayanan Kesehatan Reproduksi Berbasis Digital untuk Perempuan yang membutuhkan adanya kolaborasi dalam penyediaan informasi layanan kesehatan yang mudah dan transparan dalam satu platform/kanal digital publik (tidak berbayar) tentang rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya agar warga mengetahui dan

	mudah mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Komitmen ini dapat berkontribusi untuk memastikan akses informasi tentang penyediaan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi khususnya bagi perempuan. <i>Platform</i> /kanal informasi yang dihasilkan dari komitmen ini sangat diperlukan untuk memudahkan perempuan mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan, tanpa resiko tertular COVID-19.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah, khususnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi akan membuka data terkait fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua dan memudahkan masyarakat untuk memberikan umpan balik sebagai bentuk partisipasi perbaikan layanan yang ada.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Program ini akan mendukung Goal 3 dalam SDGs yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Selain itu, program ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, khususnya agenda ketiga: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar, salah satunya dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Program ini juga selaras dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi.  Program ini akan mendukung pengarusutamaan dalam RPJMN untuk Transformasi Digital, yang beririsan dengan target pembangunan manusia yaitu: Integrasi pelayanan kesehatan dan penyimpanan rekaman data pasien dengan menggunakan Big Data.
Informasi tambahan.	Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa layanan untuk perlindungan perempuan berbasis teknologi, beberapa di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPA telah mengembangkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni</li> </ol>

PPA), yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi dan kab/kota secara riil *time*. Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.

2. Selanjutnya, Pada 29 April 2020, Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA), yaitu layanan konsultasi psikologi untuk masyarakat. Selain KSP, layanan Sejiwa juga mendapatkan dukungan dari tujuh kementerian dan lembaga lainnya, yaitu: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, PT Telkom, hingga Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). Melalui layanan psikologi SEJIWA, KPPA memberikan pendampingan bagi para perempuan dan anak terdampak COVID-19, seperti perempuan korban KDRT, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, perempuan pekerja migran, perempuan disabilitas, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
3. Pada akhir Maret 2020, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Gojek, Halodoc, Grab dan Good doctor meluncurkan TEMENIN (Telemedicine Indonesia: <https://temenin.kemkes.go.id/>), untuk membantu masyarakat berkonsultasi seputar kesehatannya saat isolasi mandiri. Pelayanan telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

	<p>Selain itu, terdapat juga lembaga negara yang menjalankan fungsi pendokumentasian isu-isu kekerasan terhadap perempuan, yaitu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah Lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia (LNHAM) perempuan Indonesia yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Pendokumentasian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan diterbitkan setiap tahun dalam Catatan Tahunan (CATAHU).</p> <p>Namun, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni memastikan adanya kesinambungan dari platform dan pusat pelayanan serta respon pengguna layanan. Selain itu, akses internet dan keterkaitan antara konektivitas juga menjadi aspek yang perlu dipelajari.</p>	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data yang dapat diakses oleh publik.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	

Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	Kapal Perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), dan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)

## 15. Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran Penanganan COVID-19

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
1. Seknas Fitra 2. PATTIRO 3. Indonesia Budget Center (IBC)	
Januari 2021 – Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Keuangan
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Sejak pandemi COVID-19 diumumkan secara resmi sebagai bencana nasional di Indonesia pada Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 677,20 triliun untuk berbagai komponen yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial, insentif perumahan bagi MBR, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan bantuan sektoral K/L dan Pemda.</p> <p>Dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efektif, Pemerintah telah mengembangkan sebuah portal informasi terkait anggaran penanganan COVID-19 di laman <a href="http://www.kemenkeu.go.id/covid19">www.kemenkeu.go.id/covid19</a>. Portal informasi tersebut menyajikan berbagai infografis dan peraturan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.</p> <p>Namun, informasi terkait rincian realisasi penggunaan anggaran COVID-19 di tingkat pemerintah pusat dan daerah belum bisa diakses oleh publik.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Keterbukaan informasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang mampu memberi informasi kepada publik tentang realisasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di tingkat pusat dan daerah.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Salah satu penyebab ketidakefektifan anggaran COVID-19 ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengawasi. Portal informasi anggaran COVID-19 yang mampu memberikan informasi secara

	<p>rinci akan membantu masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pengawasan dan implementasinya.</p> <p>Pengawasan terhadap anggaran darurat pandemi COVID-19 diperlukan karena alokasi anggaran yang sedemikian besar sangat rawan penyalahgunaan dan korupsi.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Portal informasi anggaran COVID-19 yang lebih rinci ini berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait realisasi anggaran yang lebih komprehensif. Dugaan-dugaan tidak efektifnya implementasi anggaran COVID19 ini akan dapat diminimalisasi jika masyarakat dilibatkan terutama dalam proses pemantauan dan pengawasannya. Hal ini sejalan dengan nilai nilai Keterbukaan Pemerintah dimana keterbukaan informasi akan menjadi landasan untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Dengan kata lain, hal ini mendorong nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi.</p>
<p>Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs</p>	<p>Komitmen ini berkaitan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16: "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan", terutama pada target 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan target 16.10 yakni menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</p> <p>Di dalam RPJMN 2020-2024 pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu titik tumpu salah satu agenda nasional yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara juga menjadi salah satu Kaidah Pelaksanaan Pembangunan, yang diwujudkan melalui pengembangan integrasi sistem</p>

	dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir.	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di daerah (dalam APBD) yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.	Januari 2021	Desember 2022
2. Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat pemerintah pusat yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 16. Pelibatan Masyarakat Sipil Dalam Pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Untuk Mendorong Efektivitas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asosiasi LBH APIK Indonesia</li> <li>2. Indonesian Judicial Research Society (IJRS)</li> <li>3. LBH Aceh</li> <li>4. LBH APIK Jakarta</li> <li>5. LBH Bandung</li> <li>6. LBH Jakarta</li> <li>7. LBH Papua</li> <li>8. LBH Masyarakat</li> <li>9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</li> <li>10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)</li> </ol>	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian Hukum dan HAM
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?</p>	<p>Selama ini, korban pelanggaran HAM yang berat kurang mendapat perhatian. Anak-anak korban pelanggaran HAM, misalnya tidak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan karena syarat beasiswa selalu berkaitan dengan prestasi akademik. Contoh lainnya di Aceh, tidak ada bantuan dari pemerintah untuk mengeluarkan peluru di badan korban konflik. Saat ini, tercatat 40.000 masyarakat sipil yang menjadi korban konflik di Aceh.</p> <p>Dalam hal ini, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) memiliki peranan yang signifikan dalam membantu pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemulihan korban pelanggaran HAM. Saat ini RUU KKR sedang dalam tahap pembahasan. Jika ada pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR, maka regulasi yang ada diharapkan dapat menguatkan posisi KKR dan</p>

	mempercepat pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat.
Apa bentuk komitmennya?	Adanya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam setiap tahapan pembahasan draft RUU KKR.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Keterlibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR diharapkan dapat menguatkan posisi KKR dalam memberikan rekomendasi dan membantu pelaksanaan pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat. Keterlibatan KKR dalam proses pemulihan memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan terhadap korban. Hal ini akan membantu banyak korban yang selama ini terabaikan dan tidak mendapat perhatian yang layak.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Komitmen ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni partisipasi. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU KKR akan meningkatkan efektivitas kinerja KKR selanjutnya.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Komitmen ini akan mendukung Goal SDGs terutama target 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, program ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024 Halaman 236 angka 2 huruf b yakni Penerapan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
Informasi tambahan.	-

Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU KKR.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		Maharani Putri S. W.
Jabatan, Departemen		Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
E-mail dan nomor telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 17. Pemanfaatan Data *Beneficial Ownership*

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif (Publish What You Pay Indonesia)	
Januari 2021 - Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> <li>3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li> <li>4. Kementerian Pertanian</li> <li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>6. Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah</li> <li>7. Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional</li> <li>8. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</li> <li>9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>11. Otoritas Jasa Keuangan</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Selama Pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia berupaya melakukan pemulihan ekonomi dengan mengeluarkan berbagai stimulus kebijakan. Salah satunya ialah dengan memperbesar penerimaan pajak dari berbagai sektor. Namun, sejumlah tantangan seperti korupsi dan sistem pendataan yang terbatas membuat penerimaan negara belum berjalan optimal.</p> <p>Oleh karena itu, keterbukaan data pemilik manfaat badan hukum perlu diakselerasi. Dalam hal ini, pemerintah diketahui sudah melakukan sejumlah langkah baik, terutama sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Atas Korporasi atau <i>Beneficial Ownership</i> (BO) serta Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kedua dasar kebijakan ini dalam dua tahun</p>

	<p>terakhir telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan pelaksana maupun Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian / Lembaga (K/L) terkait yang kemungkinan dibentuknya sistem pelayanan administrasi korporasi guna mencegah penyalahgunaan pencucian uang, pendanaan terorisme dan penyalahgunaan perpajakan.</p> <p>Meski demikian, upaya penguatan dan pemanfaatan basis data BO masih perlu ditingkatkan. Diperlukan kerja bersama (<i>co-creation</i>) untuk mengembangkan data yang terintegrasi dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan BO oleh setiap K/L. Hal ini penting dilakukan demi menjamin sistem perencanaan pembangunan yang demokratis dan akuntabel, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.</p> <p>Oleh karena itu, program ini diusulkan sebagai program tindak lanjut bersama di antara K/L dan pihak terkait. Hal tersebut didasarkan atas evaluasi pelaksanaan Renaksi 2018-2020 yang sejauh ini sudah mengalami kemajuan dengan mulai digunakannya basis data BO sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan kelapa sawit. Selain itu, upaya penguatan dan pemanfaatan keterbukaan data BO ini juga ditujukan bagi terselenggaranya agenda pembangunan yang sejalan dengan SDGs sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Akselerasi keterbukaan data penerima manfaat (<i>beneficial ownership</i>) dalam rangka penguatan dan pemanfaatan basis data BO melalui pengembangan data yang terintegrasi.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Data BO dapat dimanfaatkan untuk mencegah benturan kepentingan antara K/L sebagai pemberi izin, dengan perusahaan sebagai pemohon izin. Melalui penggunaan data ini, K/L akan mampu mengidentifikasi hubungan afiliasi antara pemberi izin dan pemohon izin secara lebih akurat. Pemanfaatan data BO dalam pencegahan konflik kepentingan juga dapat menutup lubang</p>

	<p>kelemahan regulasi dalam penanganan benturan kepentingan yang sangat mengandalkan <i>self-declaration</i> dari pihak yang merasa memiliki konflik kepentingan.</p> <p>Komitmen ini akan memberikan dua manfaat besar yakni (1) Optimalisasi penerimaan pajak dan (2) Penghematan penggunaan pajak. Selain itu, publik akan memiliki akses dalam berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak sesuai dengan hukum.</p>	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	<p>Komitmen ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Data <i>Beneficial Ownership</i> sampai saat ini belum dapat diakses oleh publik. Namun, dengan adanya keterbukaan data <i>Beneficial Ownership</i>, maka publik dapat ikut terlibat dalam proses verifikasi data BO.</p>	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	<p>Komitmen ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yakni Program Administrasi Hukum Umum terutama kebijakan pendukung penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Badan Usaha. Selain itu, komitmen ini berkaitan dengan target SDGs No. 17: "Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan", terutama pada target 17.1: "memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional ke negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya".</p>	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.	Januari 2021	Desember 2022

2. Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat	Januari 2021	Desember 2022
3. Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana		Maharani Putri S. W.
Jabatan, Departemen		Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
E-mail dan nomor telepon		sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas
	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	-

## 18. Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul	
1. Asosiasi LBH APIK Indonesia 2. Indonesian Judicial Research Society (IJRS) 3. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)	
Januari 2021 – Desember 2022	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kementerian PPN/Bappenas
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<p>Ruang kebebasan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang demokratis semakin mengecil. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa fakta. Pertama, adanya kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang melaksanakan haknya atas informasi dan ekspresi kritis masyarakat sipil atas suatu kebijakan publik. Kedua, minimnya perlindungan terhadap keamanan data dan diri pribadi bagi masyarakat sipil yang melaksanakan hak informasi dan berekspresi. Terakhir, adanya penggunaan kekuatan dan kewenangan secara berlebihan dan semena-mena terhadap hak berkumpul dan berorganisasi.</p> <p>Dalam hal ini, perlu penguatan pemahaman terkait keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang merupakan teori sebenarnya telah diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, misalnya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, belum ada arah kebijakan keadilan restoratif untuk kasus yang melibatkan perkara terkait hak berinformasi, hak berorganisasi, hak berpendapat dan hak berkumpul.</p>
Apa bentuk komitmennya?	Mewujudkan adanya jaminan keterbukaan ruang kewargaan dalam roadmap keadilan restoratif
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Komitmen ini mendukung terwujudnya keadilan restoratif yang lebih transparan sehingga masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam setiap proses peradilan.

Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni partisipasi.	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	Komitmen ini akan mendukung Goal SDGs ke-16 yakni Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan terutama target 16.3 yakni mendorong Negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Selain itu, komitmen ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, halaman 272, terkait peningkatan akses terhadap keadilan.	
Informasi tambahan.	-	
Indikator capaian dengan target terukur:	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
Tersedianya hasil penelitian dan roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berkepresiden, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	Maharani Putri S. W.	
Jabatan, Departemen	Point of Contact – Open Government Partnership in Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas	
E-mail dan nomor telepon	sekretariat.ogi@bappenas.go.id +6221-3148-551 ext. 3504	
Aktor lain yang terlibat.	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian PPN/Bappenas

	OMS, sektor privat, multilateral, dan kelompok kerja	
--	--	--



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA AKSI NASIONAL**  
***OPEN PARLIAMENT***  
***INDONESIA***  
**2020-2022**

---

## I. Pendahuluan

**Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia/Open Parliament Indonesia (OPI) Tahun 2020 - 2022** merupakan rencana aksi nasional kedua yang disusun semenjak Deklarasi Keterbukaan Parlemen Indonesia pada Agustus 2018. Rencana aksi nasional adalah sebuah dokumen yang menjadi inti pelaksanaan praktik keterbukaan di DPR RI. NAP OPI berisikan komitmen-komitmen hasil dari ko-kreasi antara Parlemen bersama dengan CSO dan stakeholder lainnya dalam jangka waktu dua (2) tahun. Setiap komitmen berisikan indikator dan target capaian yang rinci untuk memastikan terlaksananya komitmen tersebut.

NAP OPI bertujuan untuk menghasilkan komitmen dan kebijakan Parlemen yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai **Open Government Partnership** yakni **transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabilitas**. RAN OPI juga selaras dengan upaya DPR RI untuk terus mengembangkan **Parlemen Modern** melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam proses legislasi dan kegiatan parlemen. DPR RI telah menerbitkan **Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK)** sebagai upaya membangun dan mengelola infrastruktur teknologi informasi sehingga penggunaannya semakin optimal.

Tema dari **NAP OPI Tahun 2020-2022** untuk meningkatkan kanal informasi dan partisipasi DPR RI melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tema besar ini bersinergi dengan **Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020 – 2024 yang memiliki visi “Mewujudkan DPR RI Maju, Terbuka dan Responsif”**. Melalui tema besar ini NAP OPI 2020-2024 akan fokus pada mengembangkan Sistem Informasi Legislasi (SILEG), pembangunan infrastruktur *Big Data*, peningkatan Sistem Informasi Anggota Parlemen (SIAP), Pembentukan Forum Multipihak, Kerja sama dengan jurnalis untuk diseminasi inovasi parlemen dan penguatan kelembagaan parlemen.

## II. Open Parliament Indonesia

### 1. PERJALANAN OPEN PARLIAMENT INDONESIA

Dideklarasikan pada 29 Agustus 2018 dalam rangka HUT Parlemen Indonesia, . OPI adalah upaya mendorong peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi dan keterlibatan publik, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi demi terciptanya Lembaga Legislatif modern yang **representatif, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel**. Deklarasi tersebut juga meluncurkan NAP OPI pertama untuk tahun 2018-2020, yang memperkuat dukungan inisiatif keterbukaan Parlemen Indonesia. Gerakan Open Parlemen telah digalakkan oleh berbagai organisasi internasional yakni Inter-Parliamentary Union (IPU), dan Open Parliament e-Network (OPeN) dan terutama Open Government Partnership (OGP) yang dibentuk oleh Indonesia bersama tujuh negara lainnya pada tahun 2011.

Melalui OPI, DPR RI berkomitmen untuk mengimplementasikan keterbukaan dalam parlemen kepada masyarakat. Inisiatif ini juga mengutamakan proses ko-kreasi antara Parlemen dengan berbagai elemen masyarakat yakni Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Internasional (OI), Organisasi Non Pemerintah (NGO), Donor dan Akademisi untuk bersama - sama menyusun berbagai komitmen dan program mendorong keterbukaan parlemen.

DPR RI telah membangun dan mengembangkan berbagai sistem keterbukaan informasi publik. Diantaranya termasuk reformulasi struktur Pejabat **Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**, **Sistem Informasi Legislasi (SILEG)**, **Rumah Aspirasi** dsb. DPR RI juga telah mengembangkan berbagai platform repositori dokumen terdahulu seperti arsip, repositori DPR RI, dan perpustakaan.

**Berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPR RI No. 12 Tahun 2019 - 2020 Tentang Pembentukan Tim OPI, OPI memiliki tiga tugas mendasar, yakni:**

- Merumuskan kebijakan-kebijakan DPR RI untuk pelaksanaan OPI NAP.
- Merumuskan inovasi-inovasi untuk peningkatan transparansi dan keterlibatan publik di DPR RI.
- Mewakili DPR RI dalam interaksi dan kerja sama internasional yang terkait isu-isu keterbukaan informasi publik termasuk dengan Organisasi Internasional.



## 2. PERUMUSAN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN PARLIAMENT INDONESIA TAHUN 2020 – 2022

Penyusunan RAN OPI diselenggarakan bersama-sama melalui mekanisme ko-kreasi antara DPR RI dengan masyarakat yang diwakili oleh Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan Organisasi Internasional (OI). Proses ko kreasi ini melibatkan (22) Unit Kerja dalam Sekretariat Jenderal DPR RI dan lima (5) CSO dan OI.

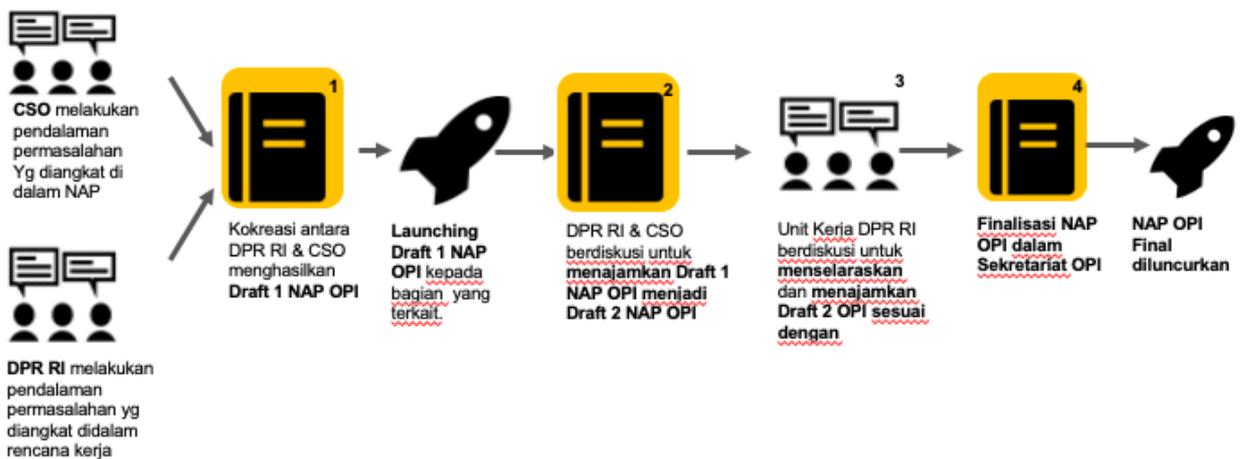
**Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia (OPI) Tahun 2020 – 2022** disusun dalam **empat tahap** selama bulan September – Desember 2020.

**Tahap pertama** adalah penjaringan usulan dari CSO dan pengadaan rapat ko – kreasi antara DPR RI dengan CSO dan OI untuk menghasilkan Draft 1 NAP OPI. Melalui tahapan tersebut terjaring tigabelas (13) usulan yang kemudian dikelompokkan awalnya menjadi lima (5) komitmen aksi.

**Tahap Kedua** adalah DPR RI dan CSO melakukan rapat untuk penajaman kembali komitmen aksi yang telah disepakati dalam rapat Ko – Kreasi sebelumnya untuk menghasilkan Draft 2 NAP OPI 2020 – 2022..

**Tahap Ketiga** adalah DPR RI melakukan serangkaian rapat penajaman untuk setiap komitmen yang kemudian diselaraskan dengan program kerja dengan unit kerja masing – masing.

**Tahap Keempat** adalah finalisasi Draft NAP OPI 2020 – 2022 di Sekretariat OPI untuk kemudian diluncurkan kepada publik dan dikumpulkan kepada OGP.



Melalui seluruh proses tersebut telah dihasilkan **enam (6) butir komitmen** dengan **24 milestones** untuk **Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia Tahun 2020 – 2022**.



### **3. MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN PARLIAMENT INDONESIA (OPI) TAHUN 2020 – 2022**

Monitoring dan Evaluasi Open Parliament Indonesia (OPI) National Action Plan (NAP) akan dilakukan pada setiap komitmen melalui rapat per tiga bulan atau setiap triwulan. Adapun setiap tahapan Monitoring dan Evaluasi akan disampaikan di dalam Multi Stakeholder Forum (MSF) antara DPR RI dan CSO.

Hasil monitoring juga akan disampaikan kepada Anggota Tim OPI yang terdiri dari sembilan Anggota Parlemen dari masing-masing Fraksi di DPR RI. Monitoring NAP OPI akan dilakukan oleh Sekretariat OPI yang terdiri dari Unit Kerja DPR RI dan juga Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat DPR RI.

### III. KOMITMEN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) OPEN PARLIAMENT INDONESIA (OPI)

Komitmen 1	
Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Melalui SILEG	
1 Januari 2020 – 31 Desember 2022	
Pimpinan badan / aktor pelaksana	Kepala Pusat Data dan Informasi (BDTI)
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa masalah masyarakat yang akan dibahas oleh komitmen tersebut?</p>	<p>Masyarakat masih kesulitan memperoleh informasi legislasi secara <i>online</i> dan lengkap secara langsung dari sumbernya di DPR RI. Hasil Survei Peta Jalan OPI 2020 - 2024 yang dilakukan pada Juli s.d Agustus 2020 yang diadakan oleh Setjen DPR RI, IPC dan WFD, menemukan bahwa mayoritas responden mendapatkan informasi mengenai parlemen dan legislasi melalui sumber sekunder seperti media berita online dan sosial media. Hal ini mengakibatkan munculnya misinformasi mengenai parlemen, termasuk informasi legislasi di masyarakat. Padahal, sudah menjadi kewajiban utama bagi DPR RI, berdasarkan mandat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk menyajikan seluruh informasi publik, serta berupaya menjadi <i>single source of truth</i> untuk informasi legislasi.</p> <p>Pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia (OPI) tahun 2018-2020, DPR RI telah membentuk Sistem Informasi Legislasi (SILEG) (Link <a href="http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list">http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list</a>) yang berfungsi untuk menyajikan informasi legislasi yang <i>up to date</i> dan mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat. SILEG menggunakan desain <i>railway legislation</i> yang terintegrasi dengan situs utama DPR RI (Link <a href="http://www.dpr.go.id/">http://www.dpr.go.id/</a>) diperuntukan agar masyarakat bisa mengikuti perjalanan legislasi dengan mudah.</p> <p>Namun platform SILEG yang terintegrasi pada situs utama DPR RI, masih belum dilengkapi dengan berbagai informasi dan data yang krusial untuk masyarakat. Informasi tersebut di antaranya; penjelasan rinci mengenai tahapan proses rancangan undang-undang (RUU) dan standarisasi dokumen legislasi yang diunggah dalam sistem.</p>

	<p>Selain itu walaupun SILEG sudah memiliki layanan yang memberikan akses partisipasi bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dan aspirasinya dalam proses legislasi melalui email kepada Badan Legislasi melalui email <a href="mailto:set_baleg@dpr.go.id">set baleg@dpr.go.id</a>. Akan tetapi system ini belum berjalan dengan optimal dari berbagai segi. Pertama adalah kurangnya respon dan tindak lanjut kepada masyarakat. Kedua adalah diseminasi pada masyarakat masih minim, sehingga masyarakat masih belum mengenal sistem tersebut. Hal ini menyebabkan hasil dari proses perancangan RUU mengalami diskoneksi dan miskomunikasi antara parlemen dan masyarakat.</p>
<p>Apa komitmennya?</p>	<p>Meningkatkan kapasitas Sistem Informasi Legislasi (SILEG) dalam penyajian informasi legislasi yang lebih lengkap dan sederhana untuk dipahami masyarakat. Peningkatan juga dilakukan dari kecepatan, keakuratan dan keterbaruan penyajian informasi legislasi, serta meningkatkan kualitas saluran partisipasi publik yang lebih responsif pada SILEG.</p> <p><b>Milestone:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan standar format data dan jenis dokumen informasi legislasi (Risalah, Dokumen Legislasi)</li> <li>2. Penguatan SDM terkait informasi legislasi melalui pelatihan dan lokakarya.</li> <li>3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SILEG yang mengatur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur publikasi risalah</li> <li>b. Jenis dan format dokumen</li> <li>c. Ketepatan waktu upload data,</li> <li>d. Monev pengelolaan SILEG</li> </ol> </li> <li>4. Pengembangan sistem saluran partisipasi publik di aplikasi SILEG</li> </ol>
<p>Bagaimana komitmen ini berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yg ada di masyarakat?</p>	<p>Komitmen ini akan memberikan platform informasi legislasi kepada masyarakat yang lebih lengkap, cepat dan akurat. Komitmen ini juga akan memperluas akses partisipasi publik dalam proses legislasi.</p>

Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi yang lebih terstandar, prosedur publikasi yang tertata dan kualitas SDM yang lebih baik. Sehingga ini berkontribusi pada nilai <b>transparansi</b> . Komitmen ini juga akan membuka kesempatan bagi publik untuk menyalurkan aspirasi dan masukannya terhadap legislasi yang sedang berjalan dan ini berkontribusi pada nilai <b>partisipasi publik</b> .	
Kesesuaian dengan Rencana Kerja Parlemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020 – 2024</li> <li>2. Pembentukan komitmen ini sejalan dengan rencana DPR RI dalam mencanangkan “Parlemen Modern,” yaitu parlemen yang representatif, transparan dan menggunakan teknologi informasi.</li> </ol>	
Informasi Tambahan	Link SILEG <a href="http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list">http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list</a> Link Partisipasi Publik Pada SILEG <a href="mailto:set_baleg@dpr.go.id">set baleg@dpr.go.id</a>	
Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat diverifikasi	Tanggal Mulai:	Tanggal Akhir:
Tersedianya standar format data dan dokumen informasi legislasi (Risalah, Dokumen Legislasi)	Januari 2021	Desember 2022
<i>Serial workshop</i> dan pelatihan untuk penguatan SDM terkait informasi legislasi melalui pelatihan dan lokakarya.	Januari 2021	Desember 2022
Tersedianya Pedoman Pelaksanaan SILEG yang mengatur antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur publikasi risalah</li> <li>• Jenis dan format dokumen</li> </ul>	Januari 2021	Desember 2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan waktu upload data</li> <li>• Monev pengelolaan SILEG</li> </ul>			
Tersedianya kanal partisipasi publik di aplikasi SILEG		Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>			
Nama penanggung jawab dari badan yang mengimplementasi		Nunu Nugraha Khuswara	
Jabatan, Departemen		Kepala Pusat Data dan Informasi (BDTI)	
Email and Nomor Telepon		<a href="mailto:nunu.nugraha@dpr.go.id">nunu.nugraha@dpr.go.id</a> +62 8129174280	
Aktor Lain yang Terlibat	Aktor Parlemen yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI</li> <li>2. Pusat Perancangan Undang-undang (PUU) DPR RI</li> <li>3. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI</li> <li>4. Kepala Biro Persidangan I (Karosid I) DPR RI</li> <li>5. Kepala Biro Persidangan II ( Karosid II) DPR RI</li> <li>6. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Irtama) DPR RI</li> </ol>	
	CSOs, sektor swasta, multilateral, working groups	Indonesian Parliamentary Center (IPC)	

## Komitmen 2

### Akses Publik terhadap Informasi Digital Parlemen dalam Format *Open Data*

**1 Januari 2020 – 31 Desember 2022**

Pimpinan badan / aktor pelaksana

Kepala Pusat Data dan Informasi (BDTI)

#### Deskripsi Komitmen

Apa masalah masyarakat yang akan dibahas oleh komitmen tersebut?

Belum maksimalnya ketersediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik menyebabkan masyarakat lebih memilih mengakses informasi dari media daring dan media sosial dibandingkan informasi yang disajikan langsung oleh DPR RI. Lemahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis internet juga menyebabkan kesempatan kolaborasi dan partisipasi publik secara digital belum sepenuhnya terbuka.

Kedua permasalahan ini selaras dengan hasil Survei Peta Jalan OPI 2020 - 2024 yang dilakukan pada Juli s.d Agustus 2020 yang menemukan bahwa mayoritas responden mendapatkan informasi dari media massa konvensional dan daring dibandingkan dari media maupun situs yang dimiliki DPR RI.

Maka dari itu, diperlukan akses data dan informasi parlemen berbasis teknologi informasi dan dokumentasi yang lebih terstruktur, terbuka dan *interoperable* melalui pembangunan infrastruktur *Big Data*, sesuai dengan standar Open Data untuk masyarakat. Kedepannya masyarakat tidak perlu lagi kesulitan mencari informasi mengenai legislasi dan parlemen dari sumber luar, karena seluruhnya disediakan oleh DPR RI.

Apa komitmennya?

Pengembangan Big Data Parlemen. Rencana Aksi ini bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

**Milestone :**

1. Persiapan Infrastruktur *Big Data* Parlemen
2. Pengembangan Pusat Data dan Video Parlemen/Parliamentary Data and Video Network/PDVN).
3. Penyesuaian standar format data dan dokumen parlemen sesuai standar Open Data

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Redesain Website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a></li> <li>5. Panduan tata kelola tentang pelayanan informasi dan daftar informasi public.</li> <li>6. Pengembangan Pemodelan Sistem Informasi Anggaran (Singgar), Sistem Informasi Pengawasan (Sinwas).</li> </ol>	
Bagaimana komitmen ini berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yg ada di masyarakat?	<p><i>Big Data</i> parlemen merupakan satu kesatuan sistem tata kelola data dari proses produksi, otorisasi, digitalisasi hingga publikasi dalam format open data. Komitmen ini bertujuan untuk memberikan akses informasi dan data parlemen yang lebih mudah, terbuka dan <i>interoperable</i> untuk masyarakat. Sebagai salah satu pusat pengetahuan bangsa, melalui komitmen ini, DPR RI diharapkan menjadi sumber data dan informasi utama untuk segala yang berkaitan dengan legislasi dan parlemen.</p>	
Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai OGP?	<p>Komitmen ini akan meningkatkan jumlah data dan informasi yang dapat diakses publik. Selain itu informasi akan dibuat lebih terintegrasi, <i>interoperable</i> dan terbuka sesuai dengan standar <i>Open Data</i>. Dengan demikian, maka komitmen ini berkontribusi terhadap nilai-nilai <b>transparansi</b>.</p>	
Kesesuaian dengan Rencana Kerja Parlemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi DPR RI (RITIK)</li> <li>2. Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020 – 2024</li> <li>3. Pembentukan ini sejalan dengan rencana DPR RI dalam mencanangkan “Parlemen Modern,” yaitu parlemen yang representatif, transparan dan menggunakan teknologi informasi.</li> </ol>	
Informasi Tambahan	<p>Link Situs Utama DPR RI <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a></p>	
Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat diverifikasi	Tanggal Mulai:	Tanggal Akhir:
Tersedianya Infrastruktur <i>Big Data</i> Parlemen	Januari 2021	Desember 2022
Tersedianya Pusat Data dan Video Parlemen /	Januari 2021	Desember 2022

Parliamentary Data and Video Network/PDVN).			
Tersedianya standar format data dan dokumen parlemen sesuai standar Open Data		Januari 2021	Desember 2022
Redesain Website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a>		Januari 2021	Desember 2022
Tersedianya panduan tata kelola tentang pelayanan informasi dan daftar informasi publik		Januari 2021	Desember 2022
Tersedianya Pemodelan Sistem Informasi Anggaran (Singgar), Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Simwas).		Januari 2021	Desember 2022
<b>Informasi Kontak</b>			
Nama penanggung jawab dari badan yang mengimplementasi		Nunu Nugraha Khuswara	
Jabatan, Departemen		Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	
Email and Nomor Telepon		<a href="mailto:nunu.nugraha@dpr.go.id">nunu.nugraha@dpr.go.id</a> +62 8129174280	
Aktor Lain yang Terlibat	Aktor Parlemen yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Persidangan I (Karasid I) DPR RI</li> <li>2. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI</li> <li>3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi DPR RI</li> <li>4. Kepala Bagian Risalah DPR RI</li> <li>5. Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen</li> <li>6. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Metaksos) DPR RI</li> <li>7. Kepala bagian Hubungan Masyarakat DPR RI</li> <li>8. Organisasi Tata Laksana (Ortala) Sekretariat</li> </ol>	

		<p>9. Jenderal DPR RI</p> <p>10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) DPR RI</p>
	<p>CSOs, sektor swasta, multilateral, working groups</p>	<p>1. Indonesian Parliamentary Center (IPC)</p> <p>2. Westminster Foundation for democracy (WFD)</p>

### Komitmen 3

#### Penguatan Sistem Informasi Anggota Parlemen "SIAP"

1 Januari 2020 – 31 Desember 2022

Pimpinan badan / aktor pelaksana

1. Kepala Biro Pimpinan DPR RI
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

#### Deskripsi Komitmen

Apa masalah masyarakat yang akan dibahas oleh komitmen tersebut?

Masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi mengenai setiap Anggota DPR RI yang sedang menjabat di Parlemen. Informasi anggota menjadi hak masyarakat sebagai konstituen untuk mengetahui informasi mengenai wakil rakyat mereka. Informasi anggota menjadi salah satu bentuk akuntabilitas parlemen kepada masyarakat. Dan sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif anggota parlemen yang mewakili kepentingan publik.

Pada situs utama DPR RI ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)) khususnya melalui halaman [www.dpr.go.id/anggota/index/](http://www.dpr.go.id/anggota/index/), sudah tersedia halaman bagi setiap anggota untuk menyajikan informasi mulai dari profil, biografi, daerah pemilihan, kegiatan, agenda, galeri foto, dokumen, buku tamu dan kontak. Anggota juga diberikan akses untuk mengintegrasikan seluruh platform komunikasi seperti blog, website, sosial media pada halaman tersebut. Namun belum dilengkapi data yang dibutuhkan, sehingga masyarakat belum terinformasi dengan baik dan cenderung menggunakan informasi luar untuk mendapatkan informasi anggota.

Apa komitmennya?

Meningkatkan kapasitas sistem informasi pada setiap Anggota DPR RI melalui situs resmi DPR RI ([dpr.go.id](http://dpr.go.id))

#### Milestone:

1. Panduan standar informasi dan Publikasi Anggota DPR dengan konstituen di antaranya:
  - a. Profil Anggota DPR RI
  - b. Informasi Reses

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kanal Sistem Informasi Anggota (terintegrasi dalam proses redesain <i>website</i>).</li> <li>3. Penguatan kapasitas Tenaga Ahli dan Staff Administrasi Anggota dalam.</li> <li>4. Peningkatan informasi anggota baik di Dapil dan di DPR.</li> </ol>	
Bagaimana komitmen ini berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yg ada di masyarakat?	Komitmen ini akan memberikan informasi yang lebih lengkap, informatif, akurat dan <i>up to date</i> mengenai setiap Anggota DPR RI, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas parlemen kepada publik secara luas.	
Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini akan menyediakan akses informasi yang lebih transparan, luas dan <i>up to date</i> mengenai setiap Anggota DPR RI kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu bentuk dari akuntabilitas Anggota Parlemen kepada konsituennya dan masyarakat yang turut menjadi target legislasi yang disusun oleh anggota. Sehingga komitmen ini berkontribusi untuk terus mendorong nilai-nilai <b>Transparansi</b> dan <b>Akuntabilitas</b> .	
Kesesuaian dengan Rencana Kerja Parlemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020 – 2024</li> <li>2. Pembentukan ini sejalan dengan rencana DPR RI dalam mencanangkan “Parlemen Modern,” yaitu parlemen yang representatif, transparan dan menggunakan teknologi informasi.</li> </ol>	
Informasi Tambahan	Link Informasi Anggota DRI RI <a href="http://www.dpr.go.id/anggota/index/">http://www.dpr.go.id/anggota/index/</a>	
Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat diverifikasi	Tanggal Mulai:	Tanggal Akhir:
Tersedianya Panduan Standar Informasi dan Publikasi Anggota DPR RI dengan konstituen diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil Anggota DPR RI</li> <li>• Informasi Reses</li> </ul>	Januari 2021	Desember 2022

Tersedianya Kanal Sistem Informasi Anggota (terintegrasi dalam proses redesain website).		Januari 2021	Desember 2022
<i>Series Workshop</i> dan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas staf anggota dalam peningkatan informasi anggota baik di Dapil dan di DPR RI.		Januari 2021	Desember 2022
<b>Kontak Informasi</b>			
Nama penanggung jawab dari badan yang mengimplementasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Djaka Dwi Winarko</li> <li>2. Rahmad Budiaji</li> </ol>	
Jabatan, Departemen		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Pimpinan DPR RI</li> <li>2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI</li> </ol>	
Email and Nomor Telepon		<a href="mailto:djakawinarko@dpr.go.id">djakawinarko@dpr.go.id</a> +62 8128308305	
Aktor Lain yang Terlibat	Aktor Parlemen yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI</li> <li>2. Kepala Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi DPR RI</li> </ol>	
	CSOs, sektor swasta, multilateral, working groups	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indonesian Parliamentary Center (IPC)</li> <li>2. Westminster Foundation for democracy (WFD)</li> </ol>	

## Komitmen 4

### Forum Multipihak untuk Dialog Kebijakan Berkala

1 Januari 2020 – 31 Desember 2022

Pimpinan badan / aktor pelaksana

1. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
2. Kepala Biro Persidangan I

#### Deskripsi Komitmen

Apa masalah masyarakat yang akan dibahas oleh komitmen tersebut?

DPR RI sudah memiliki berbagai saluran partisipasi publik baik secara online seperti Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-undangan (SIMAS PUU), Rumah Aspirasi, dan Pengaduan Publik, maupun *offline* seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Audiensi dan Kunjungan Langsung. RDPU adalah mekanisme konsultasi publik formal yang disediakan oleh DPR dengan mengundang narasumber dari organisasi masyarakat, akademisi ataupun praktisi.

Namun dalam berbagai saluran terutama secara offline, partisipasi aktif dari masyarakat masih terbatas dan *engagement* antara parlemen dan masyarakat belum maksimal. Terlebih lagi, DPR RI belum memiliki forum yang bersifat berkala dimana permintaan berpusat pada masyarakat.

Akses partisipasi masyarakat juga masih terbatas, karena banyak permintaan audiensi tidak semua bisa terpenuhi dan kegiatan seperti kunjungan dan RDPU hanya terbatas pada undangan yang ditentukan oleh komisi.

Oleh karena itu, diperlukan tambahan ruang partisipasi yang lebih dialogis di luar mekanisme yang sudah ada yang dapat menjangkau berbagai kelompok kepentingan di masyarakat dengan tema yang spesifik dan mendalam.

Sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat dan kepentingannya, DPR RI perlu memiliki forum multi pihak yang memiliki fokus pada substansi kebijakan dan legislasi serta diadakan secara berkelanjutan dan periodik. Forum ini juga bisa dimanfaatkan DPR RI untuk memetik isu-isu krusial yang ada di masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*) di masyarakat.

<p>Apa komitmennya?</p>	<p>Membentuk forum multipihak antara DPR RI dengan masyarakat dan untuk dialog kebijakan secara berkala.</p> <p><b>Milestone:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan standar pelaksanaan forum multipihak <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori prioritas tematik</li> <li>b. Mekanisme pelaksanaan forum multipihak</li> </ol> </li> <li>2. Asesmen pengelolaan partisipasi publik</li> </ol>	
<p>Bagaimana komitmen ini berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yg ada di masyarakat?</p>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk membangun ruang dialog yang lebih luas antara Parlemen dan masyarakat yang selama ini masih sangat terbatas dan kompleks. Diharapkan dengan adanya forum substantif yang konsisten dan berkelanjutan bisa menjadi platform awal yang baik untuk membangun dialog dua arah antara parlemen dan masyarakat.</p>	
<p>Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini akan berupaya untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas untuk mendiskusikan berbagai aspek isu dan substansi dalam parlemen. Melalui forum multipihak secara berkala, masyarakat tidak hanya bisa menyampaikan masukan dan aspirasi mereka, parlemen juga akan memasukkan dan merespon berbagai isu yang diberikan masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas DPR RI kepada masyarakat. Maka dari itu komitmen ini mencakup pada nilai <b>Partisipasi</b> dan <b>Akuntabilitas</b>.</p>	
<p>Kesesuaian dengan Rencana Kerja Parlemen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020 – 2024</li> <li>2. Pembentukan ini sejalan dengan rencana DPR dalam mencanangkan “Parlemen Modern,” yaitu parlemen yang representatif, transparan dan menggunakan teknologi informasi.</li> <li>3. Pasal 69 Undang-undang MD3</li> </ol>	
<p>Informasi Tambahan</p>	<p>-</p>	
<p>Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat diverifikasi</p>	<p>Tanggal Mulai:</p>	<p>Tanggal Akhir:</p>
<p>Tersedianya standar pelaksanaan forum multipihak</p>	<p>Januari 2021</p>	<p>Desember 2022</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori prioritas tematik</li> <li>• Mekanisme pelaksanaan forum multipihak</li> <li>• Mekanisme respons terhadap keluhan, aspirasi, dan permintaan publik</li> </ul>		
Tersedianya asesmen pengelolaan partisipasi publik	Januari 2021	Desember 2022
<b>Kontak Informasi</b>		
Nama penanggung jawab dari badan yang mengimplementasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juliasih, S.H., M.H.</li> <li>2. Suprihartini, S.IP., M.Si</li> </ol>	
Jabatan, Departemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. Kepala Biro Persidangan I</li> </ol>	
Email and Nomor Telepon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="mailto:juliasih@dpr.go.id">juliasih@dpr.go.id</a></li> <li>2. +62 8128048418, <a href="mailto:suprihartini@dpr.go.id">suprihartini@dpr.go.id</a></li> </ol>	
Aktor Lain yang Terlibat	Aktor Parlemen yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat DPR RI</li> <li>2. Organisasi Tata Laksana (Ortala) DPR RI</li> <li>3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPR RI</li> <li>4. Kepala Sekretariat Fraksi DPR RI</li> </ol>
	CSOs, sektor swasta, multilateral, working groups	International Association for Public Participation (IAP2)

## Komitmen 5

### Promosi Inovasi Keterbukaan Parlemen

1 Januari 2020 – 31 Desember 2022

Pimpinan badan / aktor pelaksana

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

#### Deskripsi Komitmen

Apa masalah masyarakat yang akan dibahas oleh komitmen tersebut?

DPR RI sudah mengembangkan berbagai platform dan aplikasi keterbukaan parlemen untuk masyarakat, diantaranya termasuk Sistem Informasi Legislasi (SILEG), E-PPID, Rumah Aspirasi, SIMAS PUU dst. Namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya aplikasi ini dan belum terinformasi bagaimana cara kerja serta fungsi aplikasi yang telah dikembangkan parlemen. DPR RI sudah melakukan berbagai upaya untuk diseminasi produk-produk inovasi keterbukaan tersebut namun memang belum optimal dan belum mendapatkan respon yang signifikan dari masyarakat. Untuk itu perlu pendekatan baru untuk menggaungkan kembali berbagai inovasi keterbukaan parlemen.

Pendekatan baru tersebut berupa membangun *engagement* dengan media secara lebih proaktif dan mengembangkan *data-driven journalism*. *Engagement* ini selain bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi dan informasi parlemen juga untuk memberikan kesempatan kepada awak media untuk mengolah informasi parlemen sesuai dengan tujuan jurnalisisme.

Jurnalis dan media memiliki jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat umum dibandingkan parlemen yang memiliki keterbatasan. Media memiliki berbagai aset komunikasi dan strategi yang lebih kreatif dan mumpuni untuk menarik perhatian masyarakat. Sehingga keterlibatan parlemen dengan jurnalis dan media sangat diperlukan untuk mempromosikan kembali berbagai aplikasi dan platform keterbukaan parlemen untuk masyarakat.

Jurnalis dan awak media sudah menjadi mitra yang konsisten hadir dalam parlemen. Akan tetapi kehadiran mereka baru mencakup mengenai pemberitaan legislasi dan Anggota DPR RI dan pelaksanaan fungsi DPR RI yang memperoleh perhatian publik luas. Belum banyak yang meliput mengenai inovasi

	<p>produk inovasi DPR RI terutama cara kerjanya serta pelayanan yang disediakan kepada masyarakat.</p> <p>Media memiliki berbagai aset komunikasi dan strategi yang lebih kreatif dan mumpuni untuk menarik perhatian masyarakat. Sehingga keterlibatan parlemen dengan jurnalis dan media sangat diperlukan untuk mempromosikan kembali berbagai aplikasi dan platform keterbukaan parlemen untuk masyarakat.</p>
Apa komitmennya?	<p>Melakukan promosi dan diseminasi informasi mengenai berbagai inovasi keterbukaan parlemen kepada masyarakat dengan melibatkan jurnalis dan media.</p> <p><b>Milestone:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun panduan penggunaan berbagai aplikasi dan sistem informasi DPR RI untuk publik</li> <li>2. Pengembangan media kampanye promosi inovasi keterbukaan parlemen (Iklan cetak, Iklan digital, Video/animasi, Media sosial)</li> <li>3. Media engagement and outreach <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Journalism Hackaton</li> <li>b. Executive Media Meeting and Visit</li> <li>c. Workshop on Media and Parliament</li> <li>d. Sayembara Inovasi Keterbukaan Parlemen</li> </ol> </li> </ol>
Bagaimana komitmen ini berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yg ada di masyarakat?	<p>Komitmen ini akan mendorong keterlibatan dan kerja sama antara parlemen dengan jurnalis dan media untuk mempromosikan berbagai inovasi keterbukaan kepada masyarakat. Melalui komitmen ini, diharapkan parlemen bisa menjangkau lebih luas masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan cara kerja aplikasi dan platform keterbukaan parlemen yang mereka butuhkan.</p> <p>Melalui kerja sama ini diharapkan juga bisa menghasilkan berbagai bentuk manual ataupun panduan penggunaan aplikasi dan platform inovasi keterbukaan parlemen seperti infografis, komik, animasi dan video yang jauh lebih menarik dan komunikatif bagi masyarakat.</p>
Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai OGP?	<p>Komitmen ini akan menjembatani fungsi jurnalis dan media dengan DPR RI untuk bersama-sama mendukung Keterbukaan Parlemen dengan mempromosikan berbagai inovasi-inovasi</p>

	keterbukaan parlemen melalui berbagai kegiatan kolaboratif. Untuk itu nilai yang dicakup adalah <b>partisipasi dan inovasi</b> .	
Kesesuaian dengan Rencana Kerja Parlemen	<p>4. Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020 – 2024</p> <p>5. Pembentukan ini sejalan dengan rencana DPR RI dalam mencanangkan “Parlemen Modern,” yaitu parlemen yang representatif, transparan dan menggunakan teknologi informasi.</p>	
Informasi Tambahan	-	
Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat diverifikasi	Tanggal Mulai:	Tanggal Akhir:
Tersedianya panduan penggunaan berbagai aplikasi dan sistem informasi DPR RI untuk publik	Januari 2021	Desember 2022
Tersedianya media kampanye promosi inovasi keterbukaan parlemen melalui <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklan cetak</li> <li>• Iklan digital</li> <li>• Video/animasi</li> <li>• Media sosial.</li> </ul>	Januari 2021	Desember 2022
Pengadaan kegiatan <i>engagement and outreach</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Journalism Hackaton</li> <li>• Executive Media Meeting and Visit</li> <li>• Workshop on Media and Parliament</li> <li>• Sayembara Inovasi Keterbukaan Parlemen</li> </ul>	Januari 2021	Desember 2022

Kontak Informasi		
Nama penanggung jawab dari badan yang mengimplementasi		Muhammad Djazuli
Jabatan, Departemen		Plt.Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
Email and Nomor Telepon		<a href="mailto:bag_humas@dpr.go.id">bag_humas@dpr.go.id</a> +62 215715333,
Aktor Lain yang Terlibat	Aktor Parlemen yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Persidangan I (Karosid I) DPR RI</li> <li>2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPR RI</li> <li>3. Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen DPR RI</li> <li>4. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI</li> <li>5. Kepala Bagian Penerbitan DPR RI</li> <li>6. Bagian Pengaduan Masyarakat DPR RI</li> <li>7. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) DPR RI</li> <li>8. Kepala Pusat Penelitian DPR RI</li> </ol>
	CSOs, sektor swasta, multilateral, working groups	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinatoriat Wartawan DPR RI</li> <li>2. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)</li> </ol>

## Komitmen 6

### Melembagakan OPI

**1 Januari 2020 – 31 Desember 2022**

Pimpinan badan / aktor pelaksana

Kepala Biro Pimpinan DPR RI

#### Deskripsi Komitmen

Apa masalah masyarakat yang akan dibahas oleh komitmen tersebut?

Pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia (OPI) tahun 2018-2020, DPR RI telah membentuk Tim OPI sebagai perangkat utama dalam melaksanakan RAN OPI. Tim ini terdiri dari Pimpinan/Anggota DPR RI yang dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, serta perwakilan masyarakat sipil. Tim OPI dan Sekretariat Jenderal DPR RI akan menjamin bahwa RAN OPI dilaksanakan, dianggarkan dan memiliki sumber daya pendukung yang memadai.

Akan tetapi masih terdapat beberapa aspek yang masih belum tercapai termasuk diantaranya adalah tata kelola Tim OPI, Sekretariat dan Masyarakat Open Parliament Eksternal, pembangunan repositori sesuai dengan standar OGP dan penguatan unit kerja OPI. Aspek-aspek ini sangat penting untuk menjamin pelaksanaan Keterbukaan Parlemen untuk bisa berjalan dengan baik.

Apa komitmennya?

Meningkatkan kapasitas dan kinerja Tim dan Sekretariat Open Parliament Indonesia (OPI) yang terdiri dari Pimpinan/Anggota DPR RI, Sekretariat Jenderal, dan perwakilan masyarakat sipil sesuai dengan standar dan ketentuan OGP.

**Milestone:**

1. Penguatan Kelembagaan Unit Kerja (Tim dan Sekretariat) OPI dengan penugasan Unit Pendukung Sekretariat Jenderal sesuai standar OGP
2. Penguatan Kerja sama OPI dengan CSO dan *stakeholder* luar
3. Pembangunan repositori OPI
4. *Peer Learning Forum(s) Open MPs - Information, Transparency and Accountability*

	<p>5. Penyusunan mekanisme tata kelola Tim OPI, Sekretariat dan Masyarakat <i>Open Parliament</i> Eksternal</p> <p>6. Studi Kelayakan Layanan <i>Call Center</i> DPR RI (<i>feasibility study</i>) - jangka dua tahun.</p>	
Bagaimana komitmen ini berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yg ada di masyarakat?	Permintaan masyarakat untuk parlemen yang semakin transparan dan partisipatif semakin tinggi di tengah perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat. Untuk itu DPR RI perlu memperkuat berbagai aspek internal yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja mereka baik secara sistem, birokrasi, sumber daya manusia (SDM), menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk parlemen yang lebih terbuka.	
Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini akan memperbaiki kapasitas DPR RI dalam partisipasi dan ko-kreasi masyarakat dalam membangun parlemen yang semakin terbuka. Pada saat yang sama, keberadaan masyarakat dalam struktur Open Parliament akan meningkatkan <b>transparansi, partisipasi</b> dan <b>akuntabilitas</b> parlemen kepada publik.	
Kesesuaian dengan Rencana Kerja Parlemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2020 – 2024</li> <li>• Pembentukan ini sejalan dengan rencana DPR RI dalam mencanangkan “Parlemen Modern,” yaitu parlemen yang representatif, transparan dan menggunakan teknologi informasi.</li> </ul>	
Informasi Tambahan	Link webpage OPI: <a href="http://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Beranda-OPEN-PARLIAMENT">http://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Beranda-OPEN-PARLIAMENT</a>	
Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat diverifikasi	Tanggal Mulai:	Tanggal Akhir:
Penguatan Kelembagaan Unit Kerja (Sekretariat) OPI dengan penugasan Unit Pendukung Sekretariat Jenderal sesuai standar OGP	Januari 2021	Desember 2022

Penguatan Kerjasama OPI dengan CSO dan stakeholder luar	Januari 2021	Desember 2022
Pembangunan repositori OPI	Januari 2021	Desember 2022
Peer Learning Forum(s) <i>Open MPs - Information, Transparency and Accountability</i>	Januari 2021	Desember 2022
Penyusunan mekanisme tata kelola Tim OPI, Sekretariat dan Masyarakat Open Parliament Eksternal	Januari 2021	Desember 2022
Studi Kelayakan Layanan Call Center DPR RI ( <i>feasibility study</i> ) - jangka dua tahun.	Januari 2021	Desember 2022
<b>Kontak Informasi</b>		
Nama penanggung jawab dari badan yang mengimplementasi	Djaka Winarko	
Jabatan, Departemen	Kepala Biro Pimpinan DPR RI	
Email and Nomor Telepon	<a href="mailto:djakawinarko@dpr.go.id">djakawinarko@dpr.go.id</a> +62 8128308305	
Aktor Lain yang Terlibat	Aktor Parlemen yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI</li> <li>2. Tata Usaha (TU) Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam)</li> <li>3. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI</li> <li>4. Kepala Pemberitaan Parlemen DPR RI</li> <li>5. Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DPR RI</li> <li>6. Kepala Bagian Hukum DPR RI</li> <li>7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas)</li> <li>8. Bagian Gedung dan Instalasi</li> </ol>

		9. Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP)
	CSOs, sektor swasta, multilateral, working groups	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indonesian Parliamentary Center (IPC)</li><li>2. Westminster Foundation for democracy (WFD)</li></ol>